



BERTRANSPORTASI SEHAT, AMAN DAN NYAMAN

TERAPKAN PERILAKU HIDUP SEHAT, AMAN DAN NYAMAN
SAAT MENGGUNAKAN TRANSPORTASI PUBLIK



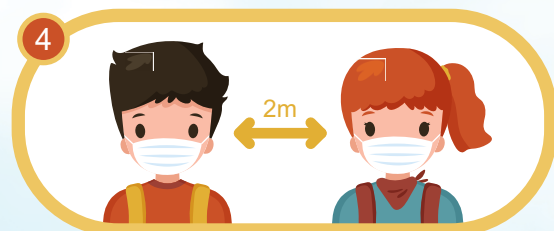
MENGGUNAKAN MASKER



MENCUCI TANGAN



CEK SUHU TUBUH

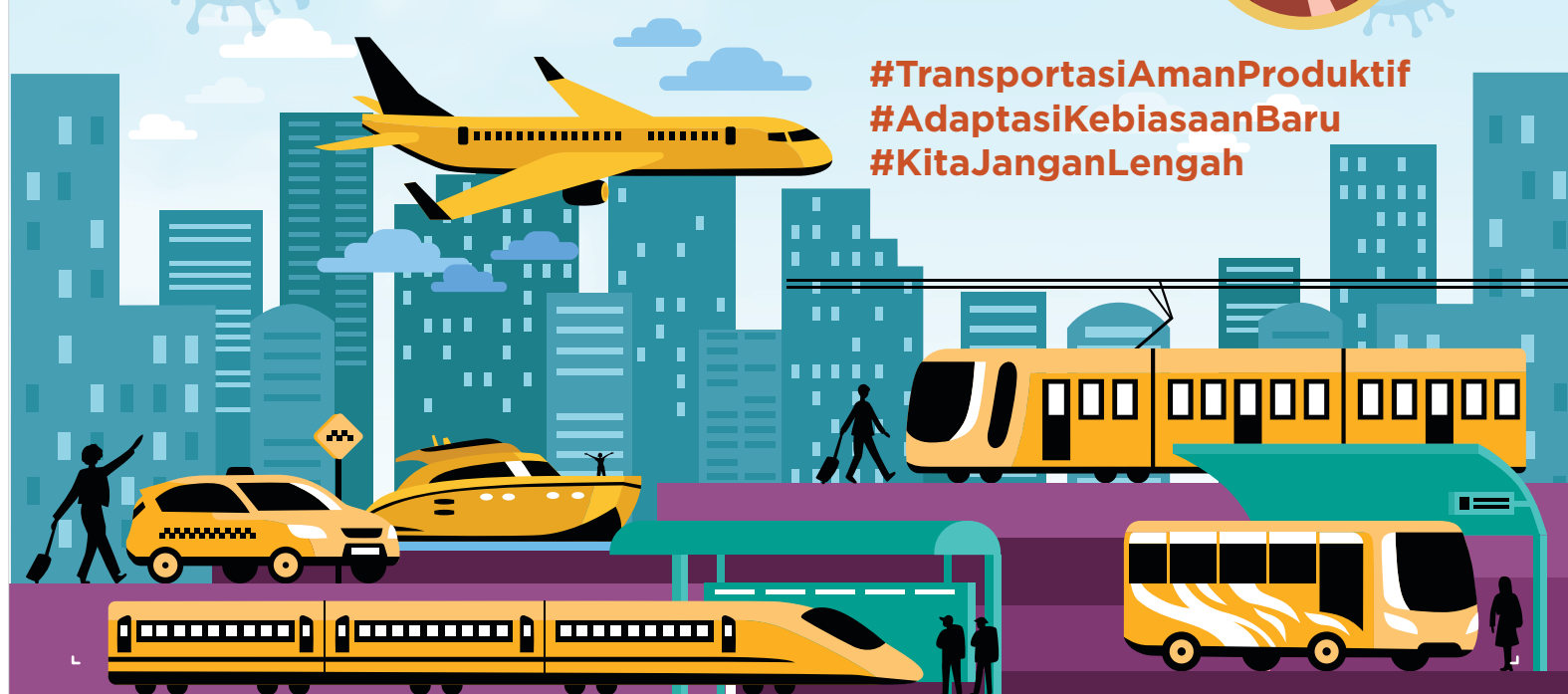


JAGA JARAK AMAN

1. Gunakan hand sanitizer setelah menyentuh benda di kendaraan umum.
2. Terapkan protokol kesehatan dengan semangat, agar Corona cepat minggat.



#TransportasiAmanProduktif
#AdaptasiKebiasaanBaru
#KitaJanganLengah



NEWSLETTER

infoHUBDAT

Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat

EDISI TRIWULAN 03 / 2020

BERSEPEDA SEBAGAI GAYA HIDUP BARU



Penguatan Konektivitas
Angkutan Perkotaan



Kenali Sepedamu!



Tertib Bersepeda, Kenapa Penting?



Pesepeda juga bagian dari lalu lintas
Sebagai sesama pengguna jalan, pesepeda wajib mengikuti aturan lalu lintas yang berlaku.

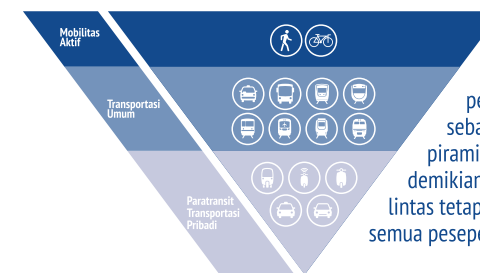
Bermanfaat untuk semua pihak
Tertib bersepeda akan membuat seluruh pengguna jalan nyaman dan selamat.

Keselamatan

Dengan mengikuti aturan lalu lintas, tertib bersepeda akan mengurangi risiko kecelakaan.

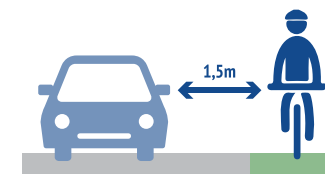
Duta Mobilitas Aktif

Dengan tertib bersepeda, kita bisa menjadi katalisator pendorong pengguna jalan lain untuk beralih ke sepeda sebagai pilihan yang lebih baik!

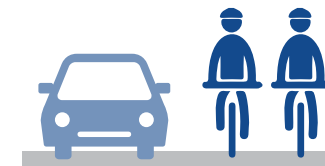


Paradigma mobilitas baru menempatkan pesepeda dan pejalan kaki sebagai prioritas utama dalam piramida mobilitas. Namun demikian, mengikuti aturan lalu lintas tetap menjadi **kewajiban** bagi semua pesepeda!

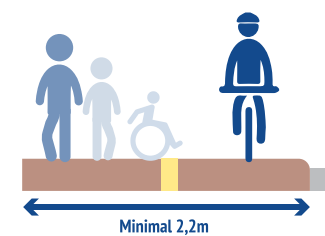
Bersepeda di Jalan



Pesepeda wajib menggunakan jalur sepeda yang tersedia
Usahakan untuk selalu menggunakan jalur sepeda di ruas jalan yang tersedia. Jaga jarak minimal **1,5 meter** dengan kendaraan lain



Tetap di tepi apabila jalur sepeda tidak tersedia
Selalu tetap di **tepi jalan** saat bersepeda di jalan tanpa jalur sepeda. Jika bersepeda bersama orang lain, Sejarar tidak boleh lebih dari **dua sepeda**



Jika memungkinkan, sepeda diperbolehkan di trotoar
Trotoar dengan lebar **minimal 2,2 meter** memungkinkan untuk dilewati pesepeda. Namun ingat, **pejalan kaki** harus diberikan **prioritas** saat melintas, khususnya **disabilitas**

Sebelum Memulai Bersepeda



Sebelum mulai bersepeda, ikuti empat daftar periksa berikut ini untuk memastikan keselamatan Anda!

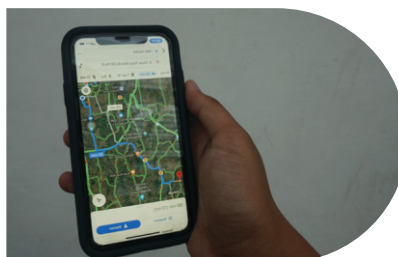
1 | Pastikan Sepedamu Siap!



Pastikan sepeda Anda memiliki:

- ✓ Rem yang baik
- ✓ Bel yang berfungsi
- ✓ Lampu depan dan belakang
- ✓ Reflektor
- ✓ Angin ban yang cukup

3 | Pilih Waktu dan Pelajari Rute Anda!



Sebelum mulai bersepeda, pilih waktu dan cek rute yang akan Anda lewati. Ketahui kondisi lalu lintas, kondisi jalur sepeda, serta ketersediaan parkir dan fasilitas pesepeda di tujuan Anda!

2 | Pastikan Keselamatan Anda!



Demi keselamatan pribadi, disarankan untuk menggunakan:

- ✓ Pakaian yang cerah dan tidak mencolok
- ✓ Alas kaki yang nyaman
- ✓ Rompi pemantul cahaya (saat malam hari)
- ✓ Helm

4 | Jangan Lupa Juga!



Demi kenyamanan Anda selama bersepeda, jangan lupa barang-barang ini:

- ✓ Kunci Sepeda
- ✓ Gembok Sepeda
- ✓ Air Minum
- ✓ Pompa Kecil
- ✓ Ban Dalam Cadangan
- ✓ Alat P3K

Bersepeda di Persimpangan



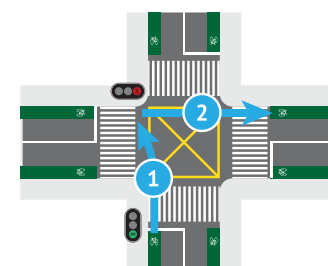
Gunakan sinyal tangan untuk berbelok

Selalu gunakan sinyal tangan saat akan berbelok, berhenti, atau mempersilakan pengguna jalan lain untuk mendahului Anda



Lampu merah = BERHENTI

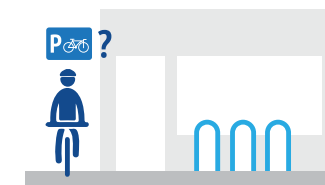
Ingat, sepeda wajib untuk mematuhi rambu dan aturan lalu lintas! Pesepeda wajib **BERHENTI** jika lampu merah menyala. Selalu ikuti isyarat lalu lintas yang ada.



Disarankan untuk melakukan Hook Turn saat berbelok di simpang

Di saat Anda ingin berbelok ke kanan di sebuah persimpangan, disarankan untuk melakukan penyeberangan dua tahap dengan metode **Hook Turn** untuk keselamatan Anda.

Memarkirkan Sepeda Anda



Ketahui lokasi parkir sepeda di tempat tujuan Anda

Ketahui gedung, pusat perbelanjaan, atau perhentian transportasi umum yang memiliki parkir sepeda demi kenyamanan Anda saat bersepeda.



Selalu bawa kunci gembok dan kunci sepeda Anda di tempat aman!

Selalu bawa **kunci dan gembok sepeda**! Kunci sepeda Anda ke parkir yang tersedia dengan mengikat bodi sepeda dengan kunci. Ikut ke tiang jika tidak ada parkir khusus tersedia.



Jika parkir di tempat umum, parkir di tempat yang aman!

Cari lokasi parkir yang dijaga atau ramai agar sepeda Anda tetap aman dan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan

Assalamualaikum Wr.Wb.

Apa kabar pembaca setia Newsletter infoHUBDAT yang budiman? Di tengah pandemi ini, kita berjumpa kembali melalui edisi ketiga Newsletter infoHUBDAT. Teriring salam hangat dan doa kepada pembaca sekalian semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dengan harapan hal ini dapat menjadi bahan catatan dan refleksi kita bersama dalam memberikan pelayanan jasa transportasi darat kepada masyarakat.



Pembaca yang budiman, pandemi Covid-19 belum usai, bahkan justru di beberapa daerah angka pasien yang terkonfirmasi positif terus naik. Namun demikian jumlah pasien yang sembuh juga bertambah. Kebijakan bekerja dari rumah baik pada sektor swasta maupun pemerintahan membuat masyarakat memiliki lebih banyak waktu luang. Selain itu di masa pandemi ini, keinginan masyarakat untuk menjaga kebugaran dan kesehatan sangat tinggi. Masyarakat banyak memanfaatkan waktu luangnya untuk berolahraga. Salah satu olahraga yang digemari masyarakat saat ini adalah bersepeda, terutama di kota-kota besar.

Pemerintah memandang *trend* bersepeda saat pandemi ini sebagai suatu hal yang positif. Antusiasme masyarakat untuk bersepeda perlu dukungan pemerintah, karena bersepeda bukan hanya sekedar berolahraga, namun juga sebagai alat transportasi. Aktivitas bersepeda biasanya dilakukan di jalan umum yang bercampur dengan kendaraan bermotor lain, baik sepeda motor maupun mobil. Disinilah kehadiran pemerintah diperlukan. Demi mengatur serta menjaga keselamatan kegiatan bersepeda masyarakat, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. Diharapkan, pemerintah daerah dapat menindaklanjuti dengan membuat Perda yang disesuaikan dengan karakter sosial budaya maupun geografis daerah masing-masing.

Sebagai sarana transportasi, sepeda dapat digunakan sebagai *feeder* menuju ke simpul transportasi angkutan umum seperti halte bus atau pun stasiun. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2020 ini membuat terobosan baru untuk memperkuat konektivitas perkotaan dengan program *Buy The Service* (BTS). Dengan skema ini, pemerintah membiayai seluruh operasional layanan angkutan umum perkotaan. Tahun 2020 ini program BTS ada di Palembang, Solo, Denpasar, Yogyakarta, dan Medan. Saat ini masyarakat dapat menikmati layanan bus BTS secara gratis. Layanan bus BTS ini juga telah terkoneksi dengan layanan Bus Rapid Transit yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat meninggalkan kendaraan pribadinya dan kembali menggunakan angkutan umum.

Pada kesempatan ini saya sampaikan himbauan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, baik diri pribadi maupun lingkungan sekitar. Tetap jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, jika terpaksa harus keluar rumah, selalu kenakan masker, dan terapkan protokol kesehatan. Bagi rekan-rekan yang harus bertugas di lapangan, saya sampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa eksistensi kita berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara tercinta. Tetap semangat dan tetap sehat.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Terimakasih atas kerjasama dan kerja keras Saudara-saudara sekalian, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.



**Ilustrasi Cover:
HMS DJPD/CAS**

Adaptasi kebiasaan baru dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan pastikan kondisi pengemudi maupun penumpang dalam keadaan sehat.

PENANGGUNG JAWAB
Imran Rasyid

REDAKTUR PELAKSANA
Endy Irawan

REDAKTUR UTAMA
Pitra Setiawan
Nanang Rahardjo
Aznal

REDAKTUR
Ardian Sukmaji
Adi Prabowo
Dinda Siahaan
Hanna Suryadika

**DESAIN GRAFIS
DAN FOTOGRAFI**
Arif Pintoko
M. Aulia Dharma
Herman Wibowo
Andrew Bryan Agustinus

SEKRETARIAT
Bejo Sri Wahono
Ratna Syaka Aprilda
Sari Hayu Hutami
Ely Rusnita
Nurhayati
Yudha Kurniawan
Kurniadi Zaini
Didik Prasetyo
Rifai Dyan Armananta
Nolita
Rusdinal
Achmad Nanang
Rosmala Damayanti
Nova Yulianasari Sopiah
M. Yunus
Reza Saputra
Nurfadilah Sinta Ningrum
Ade Yunita
Saras
Rajib

KONTRIBUTOR
Junedi Sembiring
Nurita Aprilianing Tyas
Marisa
Wahyu Arya Putra
Prisca Magdalena Samosir
Arief Eko Sumba
Cristian Andri Mardhani
Laurence
Erlika Affan
Ririn Scorvianti
Rinto Mahendra Raharjo



Diterbitkan oleh:

Humas Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat
Gedung Karya Lantai 9
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 8
Jakarta Pusat 10110
Telp./Fax. : (021) 3506141

email : humas.hubdat@gmail.com

website : <http://hubdat.dephub.go.id/>

@hubdat151

ditjen perhubungan darat

@ditjen_hubdat

ditjen perhubungan darat

Info Redaksi

Pembaca *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman,

Pandemi belum berhenti. Masyarakat tidak boleh lengah, tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Penting untuk menjaga stamina dan imunitas. Salah satunya dengan berolahraga. Saat ini bersepeda tengah menjadi trend di masyarakat. Permintaan akan sepeda sangat tinggi, membuat harga sepeda di pasaran melambung jauh. Antusiasme masyarakat untuk bersepeda adalah hal yang baik, namun jangan sampai melupakan protokol kesehatan dan harus tetap mengutamakan aspek keselamatan.

Para pembaca yang budiman, pada edisi kali ini, *Newsletter* infoHUBDAT menyajikan Laporan Utama mengenai trend bersepeda sebagai gaya hidup baru dalam masyarakat. Beberapa artikel telah kami siapkan untuk mendukung laporan utama. Diawali dengan judul besar Bersepeda Sebagai Gaya Hidup Baru. Artikel ini dilengkapi dengan sub-sub judul antara lain: Penggunaan Sepeda di Dalam dan Luar Negeri; Meningkatnya Bikesare. Selain itu ada juga artikel pendukung yaitu Keselamatan Pesepeda di Jalan; dengan sub judul Penggunaan Spakbor dan Helm Sepeda Bersifat Optional.

Kemudian, kami sajikan pula uraian mengenai perkuatan konektivitas angkutan perkotaan melalui program Buy The Service. Dalam rubrik info khusus, beberapa artikel kami sajikan, antara lain: Perkuatan Konektivitas Perkotaan; Teman Bus Hadir di Solo; serta Teman Bus Hadir di Bali.

Tak kalah menarik, tulisan mengenai Angkutan Barang Perintis yang melayani daerah-daerah terpencil, seperti misalnya di wilayah Kepulauan Natuna. Pemerintah menugaskan Perum DAMRI untuk memberi pelayanan transportasi logistik melalui subsidi angkutan barang perintis.

Selain itu kami sajikan pula, artikel mengenai kesiapan pemerintah dalam menyosong Era Kendaraan Listrik. Pemerintah telah menerbitkan regulasi PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu yang Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun telah kami himpun dan kami sajikan kepada pembaca sekalian dalam infoSelintas. Di bagian akhir, kami sajikan rekaman gambar peristiwa dan kegiatan unit kerja terkait melalui bidikan lensa. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para pembaca sekalian. (*)



daftar isi

EDISI TRIWULAN 03 / 2020



Trend Bersepeda
Warga bersepeda saat hari bebas kendaraan bermotor di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar transisi di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (21/6/2020). Foto: Kompas/ Riza Fathoni

Info Utama

04

Bersepeda Sebagai Gaya Hidup Baru

Sepeda bukanlah sebuah alat transportasi baru. Di tengah pandemi Covid-19 bersepeda menjadi pilihan transportasi bagi masyarakat dunia, baik untuk melakukan aktivitas sehari-hari maupun sebagai olahraga untuk menjaga kebugaran dan kesehatan.

9 Keselamatan Pesepeda di Jalan

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 ...

Info Khusus

12 Perkuatan Konektivitas Perkotaan

- 14 Teman Bus Hadir di Solo
- 16 Teman Bus Hadir di Bali

Info Prasarana

27 Pengalihan Aset dan Revitalisasi Terminal Tipe A

- 29 Akan Ada Kampus di Terminal Bus Gambut Barakat

Info Sarana

31 Menuju Era Kendaraan Listrik

- 33 Pentingnya Perisai Belakang Truk Trailer
- 34 Waspada Pemalsuan BLU-e

Info Angkutan

18 Angkutan Barang Perintis Layani Masyarakat Natuna

- 21 Subsidi Angkutan Barang Layani Daerah Terpencil
- 22 Sistem Transportasi Cerdas Untuk Angkutan Perkotaan

Info Lalu Lintas

23 Pengaturan Operasional Mobil Barong Pada Masa Tertentu

Info TSDP

24 Kapal Patroli Sungai, Danau, dan Penyeberangan

- 26 Kapal Roro Untuk Kepulauan Riau



Info Selintas

37

- Kemenhub Kembangkan Terminal Tipe A di Kalimantan dengan Skema KPBU
- Gelar Padat Karya, Ditjen Hubdat Libatkan Masyarakat Sekitar Terminal Bobotsari Purbalingga
- Sepakati Pelatihan SDM Di Sektor Darat, Ditjen Hubdat- BPSPMP Tanda Tangan MOU
- Gencarkan Keselamatan Berkendaraan, Ditjen Hubdat Gelar Pekan Nasional Keselamatan Jalan di Kendari
- Dirjen Hubdat Launching Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat di Sulawesi Tenggara
- Peduli Kesehatan Masyarakat, Kemenhub Bagikan Satu Juta Masker dan Hand Sanitizer Gratis
- Ditjen Hubdat Siapkan Sejumlah Regulasi Penyelenggaraan TSDP

Lensa Hubdat

41

Rekaman Berbagai Peristiwa yang Terjadi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Melalui Bidikan Lensa

BERSEPEDA SEBAGAI GAYA HIDUP BARU

Oleh: Tim infoHUBDAT

Sepeda bukanlah sebuah alat transportasi baru. Di tengah pandemi Covid-19 bersepeda menjadi pilihan transportasi bagi masyarakat dunia, baik untuk melakukan aktivitas sehari-hari maupun sebagai olahraga untuk menjaga kebugaran dan kesehatan.

Di masa pandemi seperti saat ini, semua orang memiliki ketakutan sama akan tertular virus Covid-19. Hal tersebut akhirnya memaksa semua orang untuk mengurung diri di rumah dengan harapan terjaga dan tak tertular Covid-19. Meski di rumah saja memberikan rasa aman dan terhindar dari penularan Covid-19, namun itu bukan berarti mereka baik-baik saja. Di rumah saja memang memberikan rasa aman, namun ternyata jika terlalu lama di rumah hal itu juga menimbulkan rasa bosan, apalagi jika hal itu terjadi berbulan-bulan. Oleh karena itu, masyarakat mulai membuat berbagai tren baru selama masa pandemi. Salah satu tren yang sedang banyak digemari masyarakat adalah bersepeda.

Tren bersepeda ini tidak hanya booming di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia (iNews.id, 2020). Menurut Faella Sufa selaku Direktur Institute for

Transportation and Development Policy (ITDP), bersepeda menjadi tren populer karena di satu sisi masyarakat memiliki kekhawatiran terpapar virus, namun disisi lain tetap harus melakukan kegiatan di luar rumah. Selain itu, pembatasan kendaraan umum maupun pribadi juga menjadi alasan terjadinya tren bersepeda ini (Tirto.id, 2020).

Dilansir dari iNews.id Tren bersepeda ini diakibatkan dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masyarakat lebih memilih bersepeda daripada mengunjungi mal atau pusat keramaian, hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengusir rasa jenuh di rumah. Selain itu, alasan masyarakat memilih bersepeda karena dianggap lebih aman, ramah lingkungan, terjangkau, serta dapat memperoleh udara segar dan bersih. Konten-konten yang berisi aktivitas bersepeda yang menjamur di media sosial juga menjadi pemicu munculnya tren

bersepeda ini (Kompas.com, 2020). Kepopuleran olahraga baru ini berbanding lurus dengan peningkatan penjualan sepeda di pasaran. Menurut William Gozali selaku Brand Director PT Inera Sena, pemilik merek sepeda Polygon, terdapat kenaikan permintaan sepeda sejak April 2020. Akan tetapi lonjakan permintaan tersebut baru naik drastis ketika pemerintah mulai melakukan pelonggaran PSBB. Kenaikan permintaan sepeda ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi juga terjadi di kota-kota kecil bahkan di lingkup pedesaan. Persentase permintaannya pun berbeda-beda, mulai dari 50% , 100%, hingga 200%.

Penggunaan Sepeda di Dunia

Perancis

Anggaran untuk penyediaan fasilitas parkir sepeda semula 20 juta naik menjadi 60 juta euro pada Mei 2020 (Forbes.com) Di Perancis, pengendara sepeda

dapat mengklaim 0,28 dollar per kilometer dari perusahaan tempat mereka bekerja setelah proyek percobaan 6 bulan pada tahun 2014 silam.

Meskipun bebas pajak hanya tersedia sebesar 227 dollar dalam satu tahun, kelompok kampanye pesepeda, Fédération Française des Usagers (FUB), mendorong pemerintah untuk menaikkan batas bebas pajak menjadi 455 dollar per tahun.

Dalam percobaan tersebut, muncul pendapat skeptis yang mempertanyakan apakah jumlah uang tersebut benar-benar cukup bagi orang-orang untuk “membuang” mobil mereka. Hasil uji coba selama enam bulan menunjukkan hasil yang tidak begitu signifikan.

Melansir Huffington Post, 29 Februari 2019, saat 8.210 pesepeda diberikan 0,28 dollar per kilometer perjalanan ke tempat kerja, jumlahnya hanya

bertambah dari 200 di awal proyek menjadi 419 di akhir. Hanya 19 persen dari pengendara sepeda baru merupakan hasil peralihan dari pengendara mobil. Mayoritas pesepeda baru merupakan orang-orang yang sebelumnya menggunakan transportasi umum.

Inggris

Penggunaan sepeda pada masa pandemi milik pribadi meningkat 33% dan bike sharing meningkat 12% (globalwebindex.com)

Fenomena pesepeda selama pandemi corona di Inggris. Dampak pandemi menyebabkan 61% orang Inggris takut untuk menggunakan angkutan umum. Terjadi peningkatan pemesanan sepeda hingga 200%, terutama oleh pekerja yang tetap harus bekerja diluar rumah saat pandemi. Penjualan sepeda sangat besar di penjualan rantai sepeda dan suku cadang. Penjualan sepeda yang biasanya 20-30 per minggu, meningkat

menjadi 50 sepeda setiap hari. Tindakan sementara waktu yang dilakukan beberapa kota di Inggris adalah membuat jalur sepeda non permanen dengan mengambil sebagian ruang kendaraan bermotor menjadi ruang bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Di Inggris, pemerintah memprioritaskan pendanaan £ 2 miliar untuk infrastruktur sepeda, dan sudah digunakan £ 250 juta saat pandemi. Kebijakan ini disebut sebagai kebijakan once in generation, karena untuk pertama kalinya pemerintah memprioritaskan pendanaan untuk infrastruktur sepeda dalam jumlah besar.

Memprioritaskan sepeda dalam kebijakan pasca pandemi, (1) membuat program baru untuk mengembangkan infrastruktur sepeda yang terhubung di seluruh kota/daerah, untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kebijakan infrastruktur



Presiden Jokowi berolahraga sepeda sambil membagikan masker di area Kebun Raya Bogor (KRB) Sabtu pagi 15 Agustus 2020 -lyud Walhadi-BPMI



Warga mengayuh sepedanya saat melintas di jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020. Untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat, Kementerian Perhubungan menyiapkan regulasi terkait keselamatan pesepeda yang meliputi pemantulan cahaya bagi pesepeda, jalur sepeda, serta penggunaan alat keselamatan. ANTARA FOTO/ Nova Wahyudi

sepeda membantu kebijakan pengurangan emisi, (2) investasi jalur sepeda sebagai jalur rekreasi, (3) insentif komuter sepeda, (4) skema kebijakan pemberian diskon bagi karyawan yang membeli sepeda untuk bekerja.

Di Inggris diperkenalkan skema kupon £ 50 per kepala untuk membeli sepeda. Skema yang sama juga dilakukan di Perancis. Mendorong pemerintah daerah untuk membuat perubahan signifikan pada tata ruang jalan mereka untuk memberikan lebih banyak ruang bagi pengendara sepeda dan pejalan kaki.

Amerika Serikat

Peningkatan jumlah penggunaan sepeda sebesar 40% di Bulan Maret Juni 2020. (US Embassy Official Release: Pandemic Impact on Transportation pg 7 Mo) Sementara di Amerika Serikat, saat pandemi, pemerintah di Amerika Serikat melakukan pembatasan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Pengguna sepeda di beberapa kota, seperti Philadelphia meningkat hingga 150%. Beberapa ruas jalan untuk kendaraan bermotor diubah menjadi jalur sementara bagi pesepeda dan pejalan kaki. Kota yang paling banyak menutup jalan untuk jalur sepeda dan pejalan kaki adalah kota Oakland, California. Sebanyak 85% orang

Amerika menganggap bersepeda sebagai moda transportasi yang lebih aman dibandingkan dengan transportasi umum saat social distancing.

Survey yang dilakukan Trekbike (2020) di beberapa negara, membagi tiga kelompok pesepeda saat pandemi ini. Pertama, penggemar sepeda. Penggemar sepeda ini sudah bersepeda sebelum pandemi coronavirus. Mereka memiliki hobi bersepeda.

Kedua, pengendara sepeda keluarga. Pengendara sepeda keluarga biasanya bersepeda untuk santai dan rekreasi. Sebanyak 63 persen pesepeda kategori ini bersepeda untuk menghilangkan stres dan kecemasan karena pandemi.

Ketiga, pengendara sepeda ke tempat kerja. Pengendara sepeda ini menggunakan sepeda untuk ke tempat kerja. Sebanyak 85 persen pesepeda kategori ini menganggap bersepeda sebagai moda transportasi yang lebih aman daripada transit.

Di sisi lain, kecelakaan pengendara sepeda di New York (Amerika Serikat) meningkat hingga 43% selama pandemi corona. Penyebabnya, peningkatan kecelakaan pengendara sepeda terjadi karena

lonjakan pesepeda baru belum didukung oleh infrastruktur yang baik bagi pesepeda. Faktanya, 10 dari 28 pesepeda yang tewas di jalan-jalan New York City tertabrak oleh pengemudi kendaraan bermotor. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia.

Beberapa negara bagian mempersiapkan jaringan infrastruktur pesepeda. Sejumlah kota memperluas infrastruktur pesepeda, baik sementara atau secara permanen selama pandemi coronavirus. Bogotá menambah jaringan sepeda sepanjang 22 mil. Proyek percontohan NUMO (New Urban Mobility Operator) melakukan kegiatan meminjamkan e-sepeda kepada pekerja perawatan kesehatan.

Philadelphia menanggapi petisi publik untuk menciptakan lebih banyak ruang bagi pengendara sepeda dan pejalan kaki untuk beroperasi dengan aman dengan menutup segmen jalan besar sepanjang 4,4 mil. Mexico City mengusulkan rencana untuk 80 mil infrastruktur sepeda sementara untuk mengurangi risiko penggunaan transportasi umum dan memfasilitasi mobilitas di megalopolis lebih dari 21 juta orang.

Memprioritaskan infrastruktur yang aman bagi pesepeda sehingga semakin banyak



Warga Jakarta menggunakan masker bersepeda di jalan protokol pada Minggu (7/6) - MI/ AndryWidiyanto

Sumber: <https://mediaindonesia.com/mega-politan/319364/antusiasme-warga-jakarta-bersepeda-selama-psbb-dinilai-minim>

orang bersepeda. Penambahan pendanaan untuk infrastruktur sepeda seiring dengan pesepeda yang bertumbuh. Pendanaan infrastruktur sepeda sebanding dengan pendanaan yang disediakan untuk program transportasi lain. Di Amerika Serikat pendanaan infrastruktur sepeda naik 40%.

Jerman

Berlin baru-baru ini menerapkan jalur sepeda sementara 1 mil di sepanjang jalan utama dan memiliki rencana untuk memperluas infrastruktur pop-up, bersama dengan 133 kota Jerman lainnya. Oakland, Minneapolis, Denver, Louisville, Vancouver dan Calgary telah menerapkan tindakan serupa. Bagi kota metropolitan Berlin sebagai ibukota Jerman, pandemi corona memicu fenomena baru yakni demam bersepeda. Pemerintah kota juga menanggapi positif tren ini dengan memperluas jalur khusus sepeda dan mempersempit sebagian jalur mobil.

Bikeshare Meningkat

Peningkatan penggunaan sepeda memberi dampak positif kepada perusahaan bikeshare di berbagai negara. Sebuah perusahaan

Antusias masyarakat bersepeda sudah cukup tinggi, oleh karena itu pemerintah memanfaatkan momentum ini menjadi peluang untuk menata transportasi bersepeda dalam segala hal.

bikeshare Wuhan, Meituan Bikeshare mampu menyediakan sekitar 2,3 juta perjalanan di Wuhan. Sebanyak 286.000 orang menggunakan layanan ini dengan total perjalanan bersepeda mencapai 2 juta mil. Jarak rata-rata harian untuk satu perjalanan meningkat 10%.

Sistem bikeshare publik New York City, Citi Bike, mengalami lonjakan permintaan 67% pada awal Maret dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Chicago dan Philadelphia mengalami peningkatan dalam program bikeshare mereka hampir dua kali lipat selama bulan Maret. Salah satu jalur sepeda utama Philadelphia mengalami peningkatan lalu lintas 470%.

Menurut Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, beberapa contoh kebijakan tentang bersepeda di beberapa negara dapat menjadi pedoman untuk mengembangkan sepeda sebagai sarana transportasi pilihan masyarakat. "Antusias masyarakat sudah cukup tinggi untuk bersepeda, oleh karena itu pemerintah memanfaatkan momentum ini menjadi peluang menata transportasi bersepeda dalam segala hal," kata Djoko.

Penggunaan Sepeda di Indonesia

Di Indonesia, sepeda telah digunakan sejak dahulu kala. Berbagai sumber menyebutkan

INFO UTAMA



Gambar isyarat tangan pesepeda berdasarkan PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan

bahwa jalan di kota kota besar Hindia Belanda seperti Batavia, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Medan ramai oleh pesepeda.

Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia mencatat, peningkatan signifikan pesepeda di DKI Jakarta saja hingga 1.000 persen atau 10 kali lipat selama pandemi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Limpo, mengakui pihaknya mesti lebih giat memastikan fasilitas pesepeda berfungsi. Ia berjanji akan memastikan kepolisian turut menjaga operasional jalur sepeda sementara di pusat Jakarta. Pemprov DKI memiliki sejumlah program agar tren bersepeda warga ibu kota tak berhenti pada tataran hobi. Salah satunya adalah target menyediakan jalur sepeda sepanjang 545 kilometer.

“Kami mendorong agar penggunaan sepeda sebagai alat transportasi terus meningkat. Sepeda satu-satunya alat transportasi efisien dan ekonomis,” kata Syafrin.

“Kami harap dengan pola mobilitas ini, tujuan membangun kota yang berkelanjutan dan ramah bagi warganya bisa tercapai,” tuturnya.(*)



Infografis Kompas. Tren pembelian sepeda meningkat di masa pandemi. Berdasarkan google trends pencarian dengan kata kunci sepeda pun sangat meningkat.



Warga bersepeda setelah jam kerja di lajur khusus sepeda di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (14/7/2020). Dirlantas Polda Metro Jaya dan Dishub DKI Jakarta telah menyepakati jam operasional jalur sepeda pada pagi dan sore hari selama PSBB Transisi. (Sumber: Liputan6.com/Fery Pradolo)

KESELAMATAN PESEPEDA DI JALAN

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan per 14 Agustus 2020 untuk mewujudkan tertib berlalu lintas dan menjamin keselamatan penggunaan sepeda di jalan. Peraturan ini sebagai panduan teknis bagi daerah untuk membuat aturan lebih lanjut dalam mengatur sepeda sebagai alat transportasi jarak pendek.

Pada intinya, pembangunan jalur sepeda yang dibangun harusnya jalur sepeda yang terproteksi. Pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib berlalu lintas

dan menjamin keselamatan penggunaan sepeda di jalan. Ada tiga hal yang diatur, yaitu persyaratan teknis sepeda, tata cara bersepeda dan fasilitas pendukung sepeda.

Bagi sahabat disabilitas yang menggunakan sepeda untuk beraktivitas juga turut diatur. Sepeda yang digunakan sahabat disabilitas harus menggunakan tanda pengenalan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepeda.

Fasilitas harus disediakan oleh setiap penyelenggara fasilitas umum yang ditempatkan paling sedikit pada simpul transportasi, gedung perkantoran, pusat

perbelanjaan, sekolah, dan tempat ibadah.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan sepeda di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya.

Sepeda merupakan kendaraan tidak bermotor yang dilengkapi dengan stang kemudi sadel dan sepasang pedal yang digunakan untuk menggerakkan roda dengan tenaga pengendara secara mandiri.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyatakan bahwa dalam PM 59/2020 ini terdapat beberapa aspek utama yang diatur salah satunya persyaratan teknis sepeda dimana sepeda digolongkan menjadi 2 kategori yakni sepeda untuk kepentingan umum dan kepentingan olahraga. “Kalau untuk kepentingan umum dapat digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Ke depannya

kami mengharapkan bahwa sepeda ini dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari masyarakat seperti ke sekolah, kantor, pasar, atau ke mall,” jelas Dirjen Budi.

Ada 7 jenis persyaratan keselamatan yang harus dipenuhi pesepeda saat di jalan yaitu:

- spakbor;
- bel;
- sistem rem;
- lampu;
- alat pemantul cahaya berwarna merah;
- alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning; dan
- pedal.

Dalam PM 59/2020 disebutkan bahwa penggunaan spakbor dikecualikan untuk jenis sepeda balap, sepeda gunung, dan jenis sepeda lain. Untuk penggunaan lampu dan alat pemantul cahaya juga disebutkan harus dipasang pada malam hari dan dalam kondisi jarak pandang terbatas karena gelap, atau saat hujan lebat, berada di terowongan, atau pada saat kondisi jalanan berkabut.

“Saat berkendara di jalan terutama malam hari para pesepeda harus menyalakan lampu dan menggunakan pakaian maupun atribut yang memantulkan cahaya. Jangan lupa harus menggunakan alas kaki atau sepatu serta yang penting juga yaitu memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas, serta menggunakan helm untuk pesepeda,” ujar Dirjen Budi.

Lebih lanjut lagi, Dirjen Budi menjelaskan, “Kami berharap pada pengelola gedung, sekolah, kantor, dapat menyediakan tempat parkir sepeda di masing-masing gedung sehingga nantinya ada perubahan kebiasaan masyarakat kita dari yang biasanya menggunakan sepeda motor jadi menggunakan sepeda,” ucap Dirjen Budi.



Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi sedang bersepeda bersama Dedy Corbuzier di kawasan GBK, Jakarta, 18/9/2020. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Sosialisasi PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. Foto: HMS DJPD/WBW

Mengenai lokasi parkir, dalam PM 59/2020 ini dinyatakan bahwa fasilitas parkir umum untuk sepeda dapat berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan tidak mengganggu arus pejalan kaki serta terdapat rak, tiang, atau sandaran yang memungkinkan bagi sepeda untuk dikunci atau digembok.

Selain itu, dijabarkan juga dalam regulasi ini jika parkir umum untuk sepeda harus disediakan oleh setiap penyelenggara fasilitas umum seperti simpul transportasi, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah, dan tempat ibadah. Dalam PM 59/2020 ini disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan sepeda di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan tiap daerah.

Penggunaan Spakbor dan Helm Saat Bersepeda Bersifat Opsional
Dalam PM 59/2020 ini diatur mengenai beberapa persyaratan keselamatan. Misalnya untuk

penggunaan helm maupun spakbor tidak diwajibkan dan bersifat opsional. Untuk spakbor bahkan dikecualikan bagi sepeda balap, sepeda gunung, dan sepeda lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Dirjen Budi.

Menurut Dirjen Budi, penggunaan helm bagi para pesepeda di jalan umum juga tidak diwajibkan namun masyarakat tetap dapat menggunakan helm sebagai bagian dari keselamatan saat bersepeda.

Di satu sisi, ia juga berharap dengan lahirnya PM 59/2020 ini dapat cepat diimplementasikan hingga ke daerah-daerah tingkat kabupaten/kota. “Kami ingin kelanjutan regulasi ini implementasinya bisa cepat di daerah-daerah. Saya sudah kirim surat ke seluruh Gubernur dan kantor-kantor untuk menyiapkan beberapa fasilitas pendukung bagi pesepeda hingga tingkat kota kabupaten. Artinya ada kewajiban bagi pemerintah untuk

secara bertahap menyiapkan infrastruktur bagi pesepeda sehingga menjamin keselamatan bersepeda,” demikian dijabarkannya.

Salah satu fasilitas pendukung ini antara lain adalah tersedianya parkir umum untuk sepeda. “Berikutnya kami mendorong kantor, sekolah, tempat umum, tempat ibadah, untuk bertahap menyiapkan tempat parkir bagi sepeda. Parkir untuk sepeda ini tidak hanya ruang tapi juga alat untuk parkir sepedanya. Arahkan kita parkir sepeda harus mudah dijangkau oleh pesepeda, lokasinya tidak terlalu jauh sehingga akan mendorong minat masyarakat cepat bertambah untuk bersepeda,” lanjutnya.

Dirjen Budi menjelaskan bahwa pihaknya berharap penuh dengan hadirnya regulasi PM 59/2020 ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan sepeda sebagai alat transportasi yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan untuk berpindah

tempat dalam jarak dekat. “Daya beli masyarakat saat ini sudah semakin baik, sehingga kecenderungannya adalah masyarakat mampu membeli kendaraan pribadi seperti mobil dan motor, dampaknya muncul polusi, kebisingan, dan kemacetan. Sekarang mumpung timbul fenomena penggunaan sepeda untuk kegiatan sehari-hari di masyarakat, kami bantu untuk mengembangkan minat tersebut,” kata Dirjen Budi.

Ia menambahkan, “Dengan terbitnya PM 59/2020, kita mempunyai landasan hukum untuk pengaturan penggunaan sepeda. Dasar hukum berlalu lintas ini sesuai UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam UU 22/2009 ini belum ada sanksi yang mengatur pidana bagi lalu lintas bersepeda karena pengaturan untuk kendaraan tidak bermotor itu diserahkan kepada daerah. PM 59/2020 ini sebenarnya hanya pedoman teknis bagi masyarakat agar mengetahui tata cara

bersepeda yang berkeselamatan,” jelas Dirjen Budi.

Dalam PM ini juga diatur tata cara berbelok, berhenti, dan rambu-rambu apa yang diperlukan hingga fasilitas yang diperlukan. “Secara garis besar, ada 3 hal yang diatur melalui PM 59/2020 yakni persyaratan teknis sepeda, tata cara bersepeda di jalan, dan fasilitas pendukung sepeda berupa lajur, jalur, dan fasilitas parkir,” urai Dirjen Budi.

Saat bersepeda di jalan, juga ada beberapa isyarat tangan yang dapat digunakan pesepeda sesuai PM 59/2020 misalnya saat belok kanan, belok kiri, berhenti, dan mempersilahkan untuk mendahului.

“Untuk mengakomodir kebutuhan Pemerintah Daerah, maka Pemda dapat menentukan jenis dan penggunaan sepeda apa saja yang boleh beroperasi di wilayahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah,” pungkasnya. (*)

Kehadiran program Buy The Service (BTS) yang dilakukan Pemerintah dengan pembelian layanan untuk angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan minimal (SPM) di 5 daerah merupakan langkah yang baik untuk penataan transportasi umum di daerah. Hingga saat ini, program BTS akan hadir di 5 kota yakni Palembang, Medan, Surakarta, Yogyakarta, dan Denpasar. Yang pertama beroperasi yakni di Kota Palembang telah melayani sejak 2 Juni lalu. Dan untuk kota-kota lainnya dioperasikan kemudian.

Hadir dengan nama Teman (Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal, dan Nyaman) Bus, layanan program BTS ini melayani 3 koridor di Palembang. “Jadi Teman Bus di Palembang melayani 3 koridor: Asrama Haji-Terminal Sako, Terminal Plaju-Pasar Induk Jakabaring, Terminal Alang-Alang Lebar - Dempo. Di Palembang kini tersedia sebanyak 45 unit dan mulai dioperasikan pada 2 Juni. Sampai tanggal 28 Juni saya dapatkan laporan sudah ada 46.661 orang yang mencoba layanan Teman Bus di Palembang ini. Sejauh ini tanggapan dari masyarakat Palembang sangat baik, sehingga kita harapkan terus dilakukan peningkatan kualitas agar semakin banyak masyarakat yang membiasakan diri naik angkutan umum. Pada 4 Juli ini juga kami siapkan peluncuran tahap 2 di Surakarta,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi di Jakarta, Rabu (1/7).

Di Surakarta tersedia 4 koridor, sementara di Yogyakarta 3 koridor, Denpasar 4 koridor, dan Medan 5 koridor. Dalam penggunaan Teman Bus, pelanggan diperudah dengan jalur akses melalui website, sosial media dan call centre, serta aplikasi mobile. Melalui website,

Shanghai Sunwin Bus Corporation (SUNWIN) meluncurkan Healtcare Bus yang secara khusus dirancang untuk mengurangi risiko infeksi Virus Corona dan membuat transportasi umum lebih aman. Sumber: prnewswire.com



1. Seorang penumpang sedang mencoba bus Trans Metro Dewata menjelang peluncuran program Buy The Service “Teman Bus” di Bali, 7/9/2020. Foto: HMS DJPD/WBW

2. Sejumlah penumpang di dalam bus Trans Metro Dewata. Penumpang dapat menggunakan jasa bus tersebut secara gratis. Foto: HMS DJPD/WBW

3. Pengemudi bus Trans Metro Dewata. Foto: HMS DJPD/WBW

PERKUATAN KONEKTIVITAS PERKOTAAN

Terobosan melalui program Buy The Service (BTS) didukung fasilitas teknologi informasi dalam upaya mewujudkan kondisi pelayanan angkutan massal perkotaan yang lebih baik dari sebelumnya.

pelanggan dapat mengetahui info rute, halte, peta, link download aplikasi, FAQ seputar Teman Bus. Selain itu jika pelanggan memiliki aplikasi mobile maka dapat mengecek posisi real-time, dan jadwal Teman Bus. Dalam aplikasi tersebut juga terdapat Digital Checker untuk laporan pengecekan unit bus oleh tim operasional.

Pemerintah saat ini mensubsidi 100% biaya operasional kendaraan

yang diperlukan sehingga masyarakat dapat menikmati Teman Bus dengan gratis. “Subsidi ini agar layanan angkutan juga dapat melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan. Selain itu kami harapkan karenapa biaya, gratis maka dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat,” tambah Dirjen Budi.

Adapun standar agar layanan angkutan memiliki kualitas dan

pelayanan yang prima yakni:

1. Keamanan, contohnya Ketersediaan CCTV, ID Card Driver dan Tombol Hazard;
2. Keselamatan, contohnya SOP Pengoperasian kendaraan, SOP Keadaan Darurat, dll;
3. Kenyamanan, contohnya suhu dalam bus, kebersihan, lampu penerangan;
4. Keterjangkauan, contohnya aksesibilitas, tarif;
5. Kesetaraan, contoh ketersediaan kursi prioritas;
6. Keteraturan, contoh waktu tunggu, kecepatan perjalanan dan waktu berhenti di halte.

Penerapan SPM ini nantinya harus dipenuhi oleh operator saat menjalankan layanan bus. Selain itu keunggulan Teman Bus hadir dengan ditunjang oleh fasilitas teknologi untuk berusaha mewujudkan kondisi pelayanan angkutan massal perkotaan yang jauh lebih prima dibandingkan sebelumnya. Penggunaan teknologi Internet of Things (IoT) dalam bus juga sudah mulai diterapkan. Hal ini terlihat dari beragam fasilitas yang terdapat di bus seperti

passenger counting, mobile DVR untuk monitoring yang dapat mengirimkan dengan kecepatan sinyal 2G-3G-4G, GPS tracking, kamera pengawas, serta CP4 yakni perangkat untuk monitoring kendaraan pada dashboard panel driver dan absensi driver dengan menggunakan RFID card.

Kehadiran Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menjadi penanggung risiko dalam penyediaan angkutan massal perkotaan yang merupakan public goods. Pemerintah dapat memberikan beragam keunggulan kepada angkutan umum dibandingkan angkutan pribadi dengan kebijakan yang dibuat sehingga akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan angkutan umum.

Dalam penerapan strategi program BTS, pemerintah melakukan push and pull strategy. “Push strategy ini dilakukan untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum, salah satunya dengan manajemen ruang dan waktu akses kendaraan

pribadi dengan pengaturan ruang jalan dan parkir. Sementara pull strategy maksudnya Pemerintah menarik masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yaitu dengan memberikan lisensi kepada operator dan prioritas bagi angkutan massal perkotaan agar menghasilkan layanan terbaik,” jelas Dirjen Budi.

Terkait hal ini, Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranoto, Djoko Setijowarno juga menyebutkan bahwa layanan prima dicapai dengan menyediakan layanan angkutan massal perkotaan sebagai moda prioritas dan bersifat door-to-door service. Prioritas angkutan massal perkotaan diwujudkan dengan memberikan proteksi dan subsidi. Proteksi ditujukan untuk memastikan angkutan massal memiliki keunggulan operasional (misalnya dari segi waktu tempuh, ketepatan waktu, dan kepastian layanan) dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Sementara itu, subsidi ditujukan untuk memastikan kualitas layanan prima dengan tarif terjangkau. (*)

TEMAN BUS HADIR DI SOLO

Kehadiran TEMAN BUS di Kota Solo merupakan implementasi program Buy The Service (BTS) yang kedua oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Operator yang menjalankan operasional layanan TEMAN BUS di Kota Solo adalah Batik Solo Trans.

Setelah hadir di Palembang pada 2 Juni lalu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar peluncuran layanan transportasi perkotaan berbasis jalan yang diberi nama Teman Bus di Balaikota Surakarta pada Sabtu (4/7). Teman Bus merupakan kepanjangan dari Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal, dan Nyaman ini merupakan program Buy The Service (BTS) yakni dengan membeli layanan untuk angkutan massal perkotaan

kepada operator dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan minimal (SPM).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi dalam keterangannya menyampaikan bahwa di Solo, Teman Bus akan melayani 4 koridor. "Koridor 1 yakni Bandara Adi Sumarmo-Terminal Palur, Koridor 2 melayani Terminal Kerten-Terminal Palur, Koridor 3: Terminal Kartosuro-Tugu Cembengan, dan Koridor 4:



Sebuah bus Batik Solo Trans di halaman Pendopo Balai-kota Solo, 4/7/2020. Bus Batik Solo Trans hadir dengan skema baru dalam layanan Teman Bus yang merupakan implementasi program Buy The Service. Foto: HMS DJPD/ABA

yang meliputi : sistem operasional, sistem pemeliharaan, sistem pengelolaan keuangan dan sistem SDM yang didukung dengan digitalisasi secara real time, serta diharapkan menuju angkutan umum yang lebih profesional.

Dengan kehadiran program BTS Teman Bus ini, Walikota Surakarta F. X. Hadi Rudyatmo selaku tuan rumah berterima kasih atas kehadiran Teman Bus. "Solo diberi hadiah utama karena termasuk dari 5 wilayah yang mendapatkan pelayanan BTS ini. Negara hadir memberikan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman. Terima kasih atas nama pemerintah dan masyarakat kota Surakarta, atas perkenan Bapak Dirjen memberikan pelayanan luar biasa kepada masyarakat yang lebih nyaman dan rencananya pada 17 Agustus akan jalan koridor 1 dan 2," ujar Rudy dalam acara tersebut.

Dalam peluncuran Teman Bus di Surakarta, Dirjen Budi didampingi oleh Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Risal Wasal, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) X Wilayah Jateng-DIY, Prasetyo Kentjono.(*)



Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi bersama Walikota Solo, FX. Hadi Rudyatmo, meresmikan bus Batik Solo Trans dengan konsep Buy The Service "Teman Bus" di Balaikota Solo, 4/7/2020. Foto: HMS DJPD/ABA

Terminal Kartosuro-Terminal Palur via Terminal Tirtonadi dan saat ini masyarakat dapat menggunakannya secara gratis," kata Dirjen Budi.

Dengan hadirnya Teman Bus di Solo, ia berharap headway antar bus tidak lebih dari 10 menit. "Masyarakat menunggu di halte itu tidak boleh lama. Jadi pasti 10 menit dan dapat menggunakan aplikasi (di ponsel) untuk mengecek lokasi bus," ucap Dirjen Budi. Untuk dapat menggunakan Aplikasi Teman Bus di ponsel para pengguna dapat mengunduh aplikasi di Playstore dan Appstore.

Program BTS ini menggunakan bus sedang berkapasitas 40 penumpang dengan tipe low entry dan high deck untuk mendukung disabilitas kursi roda. "Kita harus mengakomodir teman-teman disabilitas. Bus ini dilengkapi 2 pintu di depan

dengan low entry dan belakang dengan high deck. Saat ini baru mulai jalan 2 koridor, namun nanti akan beroperasi penuh 4 koridor. Selain di Palembang dan Solo, diharapkan dalam waktu dekat, program BTS yang di Jogja, Medan, dan Denpasar juga akan beroperasi," urai Dirjen Budi.

Pengembangan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di wilayah perkotaan merupakan program yang dirancang oleh Direktorat Angkutan Jalan Ditjen Hubdat agar dapat mengintervensi pengembangan angkutan umum perkotaan di Indonesia sehingga muncul terobosan yang inovatif dan responsif terhadap program bantuan bus selama ini yang dinilai kurang berhasil. Oleh karena itu dengan konsep BTS yang didukung dengan Manajemen Pengelola yang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan sistem operasional kendaraan

TEMAN BUS HADIR DI BALI

Teman Bus hadir sebagai penunjang mobilisasi masyarakat khususnya di wilayah aglomerasi Bali. Layanan Teman Bus diharapkan akan melengkapi pelayanan Trans Sarbagita yang sudah ada sebelumnya.

Sebagai tindak lanjut menghadirkan pelayanan angkutan umum di wilayah perkotaan khususnya di Provinsi Bali, Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan peluncuran program pembelian layanan angkutan perkotaan (Buy The Service/ BTS) pada Senin (7/9) yang diselenggarakan di Pasar Badung Denpasar, Bali. Layanan transportasi publik berbasis aplikasi ini dinamakan TEMAN BUS yang merupakan akronim dari (Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal, dan Nyaman) Bus.

“Hari ini kami di Bali untuk peluncuran ke 3 BTS setelah Palembang dan Solo. Penyediaan angkutan umum berbasis massal adalah kewajiban pemerintah dan ini adalah salah satu yang kita dedikasikan setelah sebelumnya (Tahun 2019) kami dari Kemenhub telah memberikan sejumlah bantuan bus di beberapa daerah. Ini semua melihat bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya, sejalan dengan peningkatan ekonomi kemudian daya beli masyarakat kendaraan menjadi tinggi. Fenomena di kota-kota besar sekarang adalah kemacetan dan salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan menghadirkan ketergantungan masyarakat pada angkutan umum,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam sambutannya pada acara

peluncuran Teman Bus di Bali. Operator yang menjalankan operasional layanan Teman Bus di Bali adalah PT. Trans Metro Dewata.

Teman Bus hadir sebagai penunjang mobilisasi masyarakat khususnya di wilayah aglomerasi Bali. Layanan Teman Bus diharapkan akan melengkapi pelayanan Trans Sarbagita yang sudah ada sebelumnya. “Layanan Teman Bus ini juga diharapkan menjadi bagian digitalisasi 4.0 smart city program yang mendukung cashless society. Kita harapkan agar dapat mengintervensi pengembangan Angkutan umum perkotaan di Indonesia sehingga muncul terobosan yang inovatif dan responsif terhadap program bantuan bus selama ini yang dinilai kurang berhasil. Khusus untuk Bali, kami hadirkan sebanyak 105 unit dan terbanyak dibandingkan Solo maupun Palembang,” tambah Dirjen Budi.

Layanan Teman Bus di Provinsi Bali melayani 4 koridor yakni:

Koridor 1 : Terminal Pesiapan – Central Parkir Kuta Badung (PP) dengan panjang koridor 58,40 KM;

Koridor 2 : GOR Ngurah Rai – Bandara Ngurah Rai dengan Panjang Koridor 33,40 KM; (sudah aktif)

Koridor 3 : Pantai Matahari Terbit – Dalung (PP) dengan panjang

koridor PP dengan Panjang koridor 30,34 KM; Koridor 4 : Terminal Ubung – Sentral Monkey Forest dengan Panjang koridor 61,70 KM.

“Layanan Teman Bus di Bali saat ini masih melayani 1 Koridor terlebih dahulu yakni Koridor 2. Diharapkan koridor 1, 3, dan 4 segera beroperasi penuh pada Oktober 2020. Program ini menggunakan kendaraan Bus Sedang yang berkapasitas 40 penumpang dengan tipe low entry dan high deck. Bus ini dilengkapi oleh area untuk penumpang disabilitas berkursi roda. Karakteristik bus ini memiliki 2 pintu masuk di bagian depan low deck dan di pintu bagian tengah adalah high deck,” jabar Dirjen Budi.

Pengembangan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di Wilayah Perkotaan merupakan sebuah program rancangan Ditjen Hubdat di tahun 2020, hadir dengan konsep Buy The Service yang didukung dengan Manajemen Pengelola yang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan sistem operasional kendaraan yang meliputi: sistem operasional, sistem pemeliharaan, sistem Pengelolaan Keuangan, dan sistem SDM yang didukung dengan digitalisasi secara real time, sehingga diharapkan menuju angkutan umum yang lebih profesional.

“Untuk sementara hingga bulan Desember 2020, penggunaan Teman Bus ini masih gratis. Dan selanjutnya akan dilakukan kajian

ability to pay masyarakat sekitar, meski subsidi masih akan kami berikan. Seperti arahan Bapak Menteri Perhubungan, kami akan usahakan untuk memberi subsidi jangka panjang hingga 5 tahun ke depan. Program ini adalah sebagai langkah awal implementasi dari program Buy The Service (BTS) yang memberikan subsidi penuh bagi operator dengan fasilitas pendukung di bus yang lebih baik, sehingga diharapkan lebih banyak penumpang yang beralih ke moda transportasi publik,” jelasnya.

Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyatakan bahwa kehadiran Teman Bus di Bali ini diharapkan dapat mengubah kebiasaan masyarakat Bali yang sebelumnya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk

mobilitas sehari-hari. “Kami harus mendorong agar masyarakat lebih mencintai penggunaan transportasi publik massal seperti ini yang lebih efisien, aman, dan murah karena bersubsidi. Ini menurut saya sangat bagus. Mudah-mudahan kehadiran bus ini akan lebih banyak yang berminat menggunakannya. Teman Bus ini menjangkau Tabanan, Badung, Gianyar dan masih bersubsidi hingga Desember sehingga agar ini menjadi minat masyarakat kita dan harus didorong” imbuhnya.

Dalam acara hari ini, hadir juga Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, Muiz Thohir, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta.(*)



Sebuah bus Trans Metro Dewata menjelang peresmian. Kehadiran TEMAN BUS di Bali menjadi layanan yang ketiga dalam program Buy The Service (BTS) oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Operator yang menjalankan operasional layanan TEMAN BUS adalah PT. Trans Metro Dewata, 7/9/2020. Foto: HMS DJPD/ WBW

ANGKUTAN BARANG PERINTIS LAYANI MASYARAKAT NATUNA

Kehadiran subsidi Angkutan Barang Perintis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan disambut baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. Perum DAMRI ditunjuk sebagai operator angkutan barang perintis bersubsidi tersebut.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memberikan subsidi Angkutan Barang Perintis dari Perum DAMRI yang akan melayani di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dengan trayek Ranai-Selat Lampa sepanjang 80 Kilometer. Salah satu tujuan pemberian subsidi angkutan barang perintis ini yakni untuk menjamin ketersediaan logistik hingga ke seluruh pelosok Indonesia.

Pemberian subsidi ini dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 95 Tahun 2020 tanggal 23 April 2020 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) DAMRI untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Jalan Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan Tahun Anggaran 2020.

“Untuk menunjang pelayanan angkutan barang dari dan ke daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3T 1P) maka diperlukan kewajiban pelayanan publik angkutan barang di jalan dari dan ke daerah

3T 1P tersebut. Oleh karena itu kami menugaskan Perum DAMRI untuk melakukan pelayanan di daerah 3T 1P, salah satunya yang ada di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi pada (25/7) di Jakarta.

Guna menjalankan subsidi angkutan barang perintis di Natuna, DAMRI telah menyiapkan 8 unit kendaraan dengan spesifikasi muatan padat dan cool box. “Layanan angkutan barang perintis dari DAMRI ini juga untuk mewujudkan konektivitas serta mengurangi kesenjangan harga antar wilayah di Indonesia, serta meningkatkan perekonomian masyarakat terlebih dalam situasi pandemi Covid-19,” tambah Dirjen Budi.

8 unit kendaraan angkutan barang ini nantinya akan mengangkut muatan yang tersambung dengan Tol Laut dari Selat Lampa menuju Ranai dan sebaliknya. “Jadi nanti untuk barang-barang yang diangkut dengan kapal dari Pelabuhan Selat Lampa akan dibawa dengan DAMRI menuju Ranai, juga sebaliknya,” ungkap

Dirjen Budi. Subsidi pemerintah sebesar 100% terhadap angkutan barang perintis ini telah berlaku mulai 22 Juli yang lalu.

Selain Natuna, ada 6 lokasi lainnya yang mendapatkan subsidi perintis di tahun 2020 yakni:

1. Pelabuhan Pomako (Timika)- Bandara Mozes Kilangin (Timika);
2. Pelabuhan Pomako- Pasar Mozes Kilangin (Timika);
3. Pelabuhan Pomako- Bandara Mozes;
4. Pelabuhan Pomako- Gerai Maritim;
5. Kantor dan Gudang BUMD PPM- Bandara Mozes;
6. Pelabuhan Merauke- Bandara Tanah Merah.

“Setelah Natuna di bulan Juli ini, nanti menyusul pelayanan di Timika dan Merauke yang akan

mulai aktif pada bulan Agustus 2020 mendatang,” ujar Dirjen Budi.

Masyarakat Natuna Menyambut Baik

Kehadiran subsidi Angkutan Barang Perintis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan disambut baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. Sejak melayani per Juli 2020 lalu, Perum DAMRI hadir sebagai operator angkutan barang perintis bersubsidi tersebut. Angkutan barang tersebut memuat logistik yang telah diangkut Tol Laut di Selat Lampa hingga Ranai.

Menanggapi adanya program angkutan barang perintis bersubsidi itu, Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal menyatakan, “Terima kasih

kepada pihak Ditjen Hubdat yang sudah memperhatikan daerah kami. Kami siap mendukung program ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan tim Ditjen Hubdat ke Natuna maka program ini akan semakin lancar. InsyaAllah saya dapat mengusahakan semaksimal mungkin dan semoga hasilnya tidak mengecewakan juga program ini dapat berjalan dengan baik,” katanya pada Senin (24/8).

Kepala Subdirektorat Angkutan Barang Direktorat Angkutan Jalan, Saiful Bachri yang hadir di Selat Lampa, Natuna saat Senin (24/8) meninjau proses pemuatan logistik dari Tol Laut di Selat Lampa mengatakan, “Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Jalan di Daerah

Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3T 1P) maka pada tahun 2020 ini kami mengusulkan ada 13 lintasan, yang pertama ini ada di Natuna dan selebihnya kebanyakan di Papua. 5 tahun ke depan kami sudah memprogramkan ini melalui rencana kegiatan strategis Hubdat untuk mengusulkan kegiatan ini, anggaran sudah kami alokasikan dan sampaikan ke Kementerian Keuangan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menekan disparitas harga di daerah 3T 1P,” katanya.

Dalam PM 10 Tahun 2020, dituliskan bahwa penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dilayani dengan angkutan barang perintis. Angkutan barang perintis ini akan digunakan untuk mengangkut barang kebutuhan pokok dan barang-ba-



Kasubdit Angkutan Barang, Saiful Bachri, bersama Kadisperindag Kabupaten Natuna, Achmad Lianda, perwakilan dari Perum DAMRI, dan sejumlah pejabat terkait, berfoto bersama dengan latar kendaraan truk angkutan barang, Natuna, 24/8/2020. Foto: HMS DJPD/HS



Sejumlah kendaraan truk angkutan barang yang dioperasikan oleh DAMRI untuk melayani angkutan logistik di Kabupaten Natuna, 24/8/2020. Foto: HMS DJPD/HS



Kasubdit Angkutan Barang Ditjen Perhubungan Darat, Saiful Bachri, bersama Kepala Disperindag Kabupaten Natuna serta perwakilan dari Perum DAMRI di Kabupaten Natuna, 24/8/2020. Foto: HMS DJPD/HS

rang penting yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah 3T 1P.

Untuk di wilayah Natuna, DAMRI telah menyiapkan 8 unit kendaraan dengan spesifikasi muatan padat dan cool box serta melayani rute Ranai- Selat Lampa yang berjarak sekitar 80 KM.

“Saat ini kami juga bersyukur, dari Pemda Natuna yang mengusulkan ke kami dan Alhamdulillah pimpinan juga mendukung sehingga program ini dapat dilaksanakan. Dari Kepala Disperindag Kabupaten Natuna juga tadi sempat menyampaikan bahwa setelah ada DAMRI ini seperti harga tabung gas elpiji 12 kg sebelumnya Rp215 ribu menjadi Rp195ribu setelah ada DAMRI ini,” tambah Saiful usai melepas keberangkatan 8 unit angkutan barang dari Selat Lampa.

Ia juga mengharapkan agar program ini merupakan kegiatan

yang benar-benar bermanfaat untuk Natuna agar masyarakat dapat merasakan harga yang tidak terlalu mahal serta dapat menekan disparitas harga.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Lianda selaku Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna menjelaskan bahwa bahwa peranan Disperindag secara umum selaku pengawas dan peninjau harga barang-barang yang dikirim dari Tol Laut.

“Kami dari Disperindag Natuna akan melihat apakah penerapan program ini sudah sesuai dengan ketentuan Kemenhub dan tujuannya mempercepat barang agar cepat sampai ke daerah-daerah terpencil di Natuna. Selama ini sudah berjalan terutama terasa di harga elpiji sesudah subsidi dari Ditjen Hubdat. Sementara ini

pengangkutan muatan dari Selat Lampa ke Ranai memakan biaya sekitar Rp700.000-Rp800.000 per truk itu yang membuat berpengaruh ke harga di sini. Oleh karena itulah yang membuat kita mengajukan subsidi angkutan barang ke Ditjen Hubdat. Alhamdulillah saat ini sudah mulai terlihat ada penekanan terhadap disparitas harga,” ucap Ahmad Lianda.

“Kami juga mohon bantuan kepada Disperindag Natuna untuk rutin melakukan pengawasan dan mengontrol harga barang. Apa benar harga sudah turun sejak mulai diberlakukan program subsidi ini. Kami juga mohon kepada Pemda agar melakukan sosialisasi supaya DAMRI dapat maksimal perannya sehingga ke depannya tidak hanya mengangkut barang dari Ranai saja melainkan sampai wilayah lain di sekitarnya,” pungkask Saiful.(*)



Subsidi Angkutan Barang Layani Daerah Terpencil

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya distribusi barang logistik yang merata di Indonesia, Pemerintah terus berupaya menekan kesenjangan (disparitas) harga antar wilayah barat dan timur Indonesia. Kementerian Perhubungan hadir dengan beberapa program lintas subsektor untuk untuk menurunkan disparitas harga barang dalam rangka menjamin ketersediaan barang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk kesinambungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) guna mendukung konektivitas logistik antarmoda transportasi. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memenuhi Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP) dengan memberikan subsidi angkutan barang di jalan.

Dalam pembahasan pelaksanaannya, Ditjen Hubdat harus berkoordinasi dengan beberapa instansi lainnya seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, maupun BUMN dan BUMD sebagai operator. Hal ini menjadi pokok bahasan dalam Seminar dan Lokakarya yang digelar oleh Direktorat Angkutan Jalan Ditjen Hubdat di Aruna Senggigi Resort & Convention Lombok, pada Kamis (10/9).

Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani menjelaskan bahwa sesuai

dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, maka Ditjen Hubdat perlu melakukan sinergitas antara program tol laut, jembatan udara, serta penyedia jasa logistik dan transportasi hingga Pemda. “Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kewajiban tersebut, kami dari Ditjen Hubdat akan berusaha memberikan layanan publik untuk angkutan barang guna membantu mendistribusikan ke sentra-sentra produksi masyarakat di daerah maupun sebaliknya dari sentra produksi di daerah kepada layanan tol laut dan jembatan udara,” jelas Yani dalam sambutan pembukanya yang disampaikan secara virtual pada semiloka yang mengusung tema Kolaborasi pemerintah dengan BUMN/ BUMD dalam Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang dari dan ke Wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

Yani menambahkan Ditjen Hubdat turut berkomitmen untuk mendukung terciptanya sinergitas transportasi untuk penunjang layanan ke daerah tujuan guna terwujudnya penurunan disparitas harga barang yang menjadi kebutuhan masyarakat di 3 TP. Pemberian subsidi ini dilakukan oleh PERUM DAMRI selaku operator angkutan barang sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 95 Tahun 2020 tanggal 23 April 2020 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) DAMRI untuk Menyelenggarakan Kewa-

jiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Jalan Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan Tahun Anggaran 2020.

“Kami persilahkan bapak ibu sekalian untuk mempersiapkan kajian supaya dapat kita bantu jaringan distribusinya dengan angkutan barang di jalan. (Angkutan barang perintis bersubsidi) saat ini baru 7 lintasan dan saya kira masih banyak lagi yang dibutuhkan karena banyak sentra produksi masyarakat yang butuh disambungkan dengan tol laut. Baik barang konsumsi masyarakat maupun barang ekspor yang untuk dipasarkan sehingga dapat dipasarkan dengan baik bahkan hingga ke Pulau Jawa dari Indonesia Timur,” kata Yani.

Ketujuh lokasi subsidi perintis tahun 2020 yang dimaksud antara lain:

1. Pelabuhan Pomako (Timika)- Bandara Mozes Kilangin (Timika);
2. Pelabuhan Pomako- Pasar Mozes Kilangin (Timika);
3. Pelabuhan Pomako- Bandara Mozes;
4. Pelabuhan Pomako- Gerai Maritim;
5. Kantor dan Gudang BUMD PPM- Bandara Mozes;
6. Pelabuhan Merauke- Bandara Tanah Merah.
7. Selat Lampa (Natuna) - Ranai (telah beroperasi).

“Ditjen Hubdat menyelenggarakan Semiloka ini dengan mengundang perwakilan lembaga dan instansi terkait agar dapat bersama-sama berdiskusi dan kami mendapatkan masukan terkait program ini guna mewujudkan konektivitas dan menekan kesenjangan harga antar wilayah barat dan timur. Kami ingin dengan hadirnya program ini masyarakat semakin mudah mengetahui informasinya dan dapat digunakan oleh pengusaha, petani, nelayan untuk memasarkan produk hasil perkebunan, pertanian, dan lainnya ke wilayah Indonesia,” ujar Yani.(*)



Kasubdit Angkutan Perkotaan, Wahyu Hapsoro

SISTEM TRANSPORTASI CERDAS UNTUK ANGKUTAN PERKOTAAN

Dengan hadirnya transportasi perkotaan yang saling bersinergi dengan perkembangan teknologi informasi maka akan menghasilkan sistem transportasi cerdas. Kondisi yang ada saat ini di Indonesia seperti adanya kemacetan, pada akhirnya mengakibatkan polusi udara sehingga harus mulai berpikir tentang pengembangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas dimana seluruh proses teknologi informasi, elektronika, serta telekomunikasi telah terintegrasi dalam penerapan manajemen transportasi sehingga pengelolaan layanan transportasi jalan menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam sambutannya pada Forum Intelligent Transportation System (ITS) Perkotaan, Wahyu Hapsoro, Kasubdit Angkutan Perkotaan

Direktorat Angkutan Jalan, menyampaikan, “Pengembangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas ini memiliki fungsi sebagai alat pengawasan, deteksi, komunikasi, pengumpulan dan pemrosesan data perencanaan dan pengaturan sistem transportasi, sekaligus juga sebagai informasi pengguna jalan secara real time.”

Menurutnya hal ini sangat penting di mana pemerintah harus lebih concern dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dengan adanya sistem manajemen transportasi cerdas ini diharapkan masyarakat menjadi lebih mudah, nyaman, aman dalam beraktivitas.

Sejalan dengan rencana pengembangan sistem manajemen transportasi cerdas, ke depannya juga angkutan

massal perkotaan ini akan menjadi lebih berkembang didukung oleh teknologi, serta adanya pengelolaan operasional kendaraan yang lebih profesional yaitu program Buy The Service (BTS).

Ia pun mengakui bahwa di dalam program BTS ini juga sangat didukung oleh teknologi yang sangat mumpuni seperti penggunaan GPS, digitalisasi secara real time sehingga masyarakat mengetahui lokasi bus, cashless society, serta aplikasi “Teman Bus” yang dapat diunduh melalui smartphone. Sehingga, diharapkan program ini bisa disinergikan pula dengan program Sistem Manajemen Transportasi Cerdas.

“Program ini menjadi salah satu pengembangan atas angkutan massal perkotaan dengan menggunakan skema BTS di lima kota besar yaitu Palembang, Solo, Medan, Yogyakarta, dan Denpasar. Program ini pun merupakan bagian dari langkah intervensi pengembangan angkutan umum perkotaan di Indonesia sehingga muncul terobosan yang inovatif dan responsif terhadap program bantuan bus selama ini yang dinilai kurang berhasil,” ujarnya.

Kepala Seksi Angkutan Massal, Hadi Setyabudi Pramono mengatakan, “Untuk ke depannya, diharapkan program BTS ini dapat memacu daerah-daerah agar mampu mengelola dan mengembangkan sarana maupun prasarana yang sudah dimiliki serta melakukan pembinaan yang baik dan tepat sasaran khususnya dalam sektor transportasi di masing-masing daerah”.

Forum yang dilaksanakan pada 22 s.d 24 Juli 2020 di Hotel JHL, Gading Serpong, Tangerang ini bertujuan untuk mengenali serta meninjau implementasi ITS sebagai dukungan dalam infrastruktur kota untuk mencapai transportasi perkotaan yang saling bersinergi.(*)

Dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pada masa-masa tertentu dapat diberlakukan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang. Masa tertentu yang dimaksud adalah libur panjang, cuti bersama, baik arus mudik maupun arus balik, atau periode waktu tertentu yang diprediksikan dapat menimbulkan lonjakan volume arus lalu lintas.

Pembatasan operasional angkutan barang pada masa tertentu biasanya dilakukan terhadap mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian meliputi tanah, pasir, dan/atau batu, bahan tambang, dan bahan bangunan. Pembatasan ini tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan ekspor atau impor, air minum dalam kemasan, ternak, pupuk, hantaran pos dan uang, serta barang-barang pokok seperti beras, tepung terigu, dan sebagainya.

Walau dikecualikan, beberapa jenis angkutan barang yang diizinkan melintas di atas diwajibkan untuk memiliki surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut. Surat muatan tersebut harus mencakup keterangan jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman barang, dan nama maupun alamat pemilik barang.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan menggandeng stakeholder terkait terutama Korlantas Polri telah beberapa kali melakukan pengaturan semacam ini. Misalnya pada saat Idul Adha bulan Agustus 2020. Untuk mempersiapkan langkah-langkah penanganan arus balik Idul

PENGATURAN OPERASIONAL MOBIL BARANG PADA MASA TERTENTU



Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, didampingi Kasubag Humas, Pitra Setiawan sedang berkoordinasi dengan petugas Polri pada saat pemantauan arus balik Libur HUT Kemerdekaan RI dan Tahun Baru Islam di Cikopo, 23/8/2020. Foto: HMS DJPD

Adha serta mencegah terjadinya kepadatan lalu lintas maka Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan menerapkan pembatasan angkutan barang sumbu 3 ke atas yang masuk jalan tol mulai dari Jawa Timur dan Jawa Tengah ke arah Jawa Barat dan Jakarta (Arah Timur ke Barat) yang akan mulai diberlakukan pada Minggu (2/8) pukul 08.00 WIB sampai dengan Senin (3/8) Pukul 08.00 WIB.

Selain pembatasan operasional mobil barang, jika dipandang perlu, dapat pula dilakukan kebijakan contra flow pada ruas jalan tertentu. Sebagai contoh, pada libur Idul Adha yang lalu, untuk memperlancar arus balik maka pihak Kepolisian bekerjasama dengan Operator Jalan Tol menerapkan contraflow dari arah Timur ke Barat di Tol Jakarta Cikampek di KM 65 (setelah pertemuan antara tol Trans Jawa dengan tol Purbaleunyi) hingga KM 47

(Ramp on Jakarta Cikampek Elevated) jika diperkirakan akan terjadi peningkatan volume lalu lintas yang signifikan terutama dari arah Timur (Jateng dan Jatim).

Sebagai dasar legalitas petugas di lapangan serta bentuk sosialisasi kepada pengguna jalan, dapat diterbitkan Surat Edaran. Seperti misalnya Surat Edaran nomor SE.17/AJ.201/DRJD/2020 tentang Pembatasan Operasional Angkutan Barang Pada Masa Arus Mudik dan Arus Balik Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 Tahun 2020 dan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah.

Pembatasan angkutan barang ataupun pengalihan arus lalu lintas ini nantinya akan memperhatikan juga kondisi di lapangan saat hari-H dan sesuai dengan diskresi dari petugas Polri. Sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan sewaktu-waktu berdasarkan evaluasi dan dinamika di lapangan.(*)

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk pertama kalinya membangun kapal patroli multi purpose sebanyak 3 unit pada tahun 2020 ini. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, disebutkan bahwa fungsi penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran Sungai, Danau, Penyeberangan (SDP) yang sebelumnya diselenggarakan oleh Ditjen Perhubungan Laut kini telah dialihkan ke Ditjen Perhubungan Darat c.q Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP).

Pada Sabtu (4/7), Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi melakukan Peletakan Lunas (Keel Laying) 3 unit kapal patroli multi purpose di galangan kapal PT. Tri Ratna Diesel, Paciran, Lamongan.

“Hal ini pasti menjadi tantangan baru bagi Ditjen Perhubungan Darat untuk mempersiapkan sarana, prasarana, regulasi, SDM, dan kelembagaannya. Dengan ini saya juga meminta peran serta semua pihak di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat khususnya Direktorat TSDP untuk saling bekerja sama dalam percepatan pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan TSDP agar dapat dilaksanakan sepenuhnya serta masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” kata Dirjen Budi.

Menurut Dirjen Budi dengan adanya kesiapan keamanan dan keselamatan yang dilakukan dapat menjadi solusi dalam menjawab permasalahan yang terus meningkat.

KAPAL PATROLI SUNGAI, DANAU, & PENYEBERANGAN

Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran Sungai, Danau, Penyeberangan (SDP) yang sebelumnya dipegang oleh Ditjen Perhubungan Laut kini telah dialihkan ke Ditjen Perhubungan Darat c.q Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP).



Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, didampingi oleh Pelaksana Tugas Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP), Pandu Yuniarto, serta Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur Hanura Kelana Irianto, meninjau pembangunan kapal patroli di galangan kapal PT. Tri Ratna Diesel, Paciran, Lamongan (4/7/2020). Foto: HMS DJPD/ABA

- SDP, yaitu pembangunan pelabuhan/dermaga di lokasi-lokasi strategis sesuai dengan Renstra 2020-2024;
3. Penyusunan regulasi;
 4. Peningkatan kompetensi SDM;
 5. Pembentukan kelembagaan.

“Kita harus banyak belajar dari kecelakaan kapal di Danau Toba. Semoga hal tersebut dapat menjadi pemicu kita untuk melakukan perubahan dan mendampingi operator maupun masyarakat yang terbentang luas di wilayah Indonesia yang sebagian besar perairan,” jelasnya.

Dalam hal ini Dirjen Budi juga menegaskan bahwa keselamatan pelayaran SDP adalah hal yang utama. “Kita harus terus belajar dengan kawan kita di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta dapat berkoordinasi dengan baik termasuk cara penanganan kecelakaan di ranah SDP. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan, namun saya yakin dan percaya dengan kerja keras, koordinasi, dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, hal tersebut dapat kita wujudkan secara bersama-sama,” pungkasnya.(*)

“Mengenai kesiapan keamanan dan keselamatan juga harus disertai dengan meningkatkan pelayanannya agar masyarakat tetap merasa aman, nyaman, dan selamat guna mendukung percepatan pertumbuhan sektor ekonomi, terutama konektivitas wilayah, distribusi logistik dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN),” tambah Dirjen Budi.

Ketiga kapal patroli yang akan dibangun ini rencananya akan digunakan untuk Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Sumatera Selatan- Bangka

Belitung (kapal ukuran 12 meter), Wilayah XVII Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (kapal ukuran 12 meter), serta Wilayah XXIV Maluku Utara (kapal ukuran 17 meter).

Pada sambutannya Dirjen Budi turut menjabarkan implementasi PM 122 Tahun 2018 yang dapat dilakukan Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan berupa:

1. Perencanaan peningkatan/ pembangunan sarana SDP, yaitu pembangunan kapal penyeberangan, bus air, dan kapal patroli;
2. Perencanaan peningkatan/ pembangunan prasarana



Penekanan tombol secara bersama-sama sebagai tanda dimulainya keel laying atau peletakan lunas pembangunan Kapal Penyeberangan Ro-Ro 1500 GT Lintas Dompok-Matak-Penagi (Natuna) di Galangan Kapal PT. Karimun Anugrah Sejati, Batam, Kepulauan Riau, 8/8/2020. Foto: HMS DJPD

KAPAL RORO UNTUK KEPULAUAN RIAU

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan Peletakan Lunas (Keel Laying) Kapal Penyeberangan Ro-Ro 1500 GT lintas Dompok – Matak – Penagi (Natuna) di Galangan Kapal PT. Karimun Anugrah Sejati, Batam, Keulauan Riau, Sabtu (8/8).

Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang ini dilakukan bersama PT. Karimun Anugrah Sejati dan PT. Arun Prakarsa Inforindo.

Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP), Marwanto Heru Santoso, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan harapannya atas pembangunan Kapal Ro-Ro 1500 GT ini. “Kita semua mempunyai harapan besar untuk Kapal Penyeberangan ini, sehingga PT. Karimun Anugrah Sejati dan PT. Arun Prakarsa Inforindo sebagai

pembangun diharapkan dapat memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas yang ada, sehingga dapat menyelesaikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan spesifikasi kapal dan waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak, sehingga dapat segera dimanfaatkan secara optimal,” kata Heru saat mengawali sambutannya.

Pembangunan kapal ini, menurut Heru, adalah salah satu kegiatan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dilakukan untuk menunjang kondisi geografis Indonesia yang berbentuk negara kepulauan. “Termasuk salah satunya adalah di Kepulauan Riau ini yang banyak dihubungkan oleh laut. Maka diharapkan ke depannya kita tidak akan mendengar kejadian kecelakaan kapal dan justru mendatangkan keselamatan.

Pada kesempatan ini kami ucapkan selamat kepada PT. Karimun Anugrah Sejati yang telah dipercaya pemerintah untuk membangun sebuah kapal,” tambah Heru.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Sarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Sri Hardianto dalam laporannya menyampaikan, “Dengan dibangunnya Kapal Penyeberangan ini diharapkan dapat memperlancar transportasi dan konektivitas serta aksesibilitas bagi distribusi orang, kendaraan, dan barang di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.”

Kapal Penyeberangan ini mempunyai kapasitas penumpang sebanyak 386 orang, dengan rincian kapasitas untuk penumpang kelas tidur 12 orang, penumpang deck ekonomi 90 orang, penumpang bed ekonomi kursi baring 180 orang, penumpang deck terbuka kursi gang 104 orang.

“Formasi kendaraan yang tersedia di dalam kapal 1500 GT ini adalah 36 kendaraan. Untuk truk besar 18 ton tersedia 14 unit, 12 unit untuk truk sedan 10 ton, dan 10 unit untuk mobil sedan. Sedangkan jumlah kapasitas untuk Anak Buah Kapal (ABK) sejumlah 24 orang,” ujar Sri.

Sri menjabarkan bahwa pembangunan kapal ini memakan waktu selama 22 bulan dan direncanakan selesai pembangunannya pada akhir tahun 2021. Ia juga menjelaskan bahwa Kapal Penyeberangan ini mempunyai ukuran utama panjang keseluruhan LOA (length over all) 71,92 meter, panjang antara garis tegak LBP (length between perpendicular) 65,40 meter, lebar modul 14 meter, tinggi modul 4,60 meter, sarat air 3,25 meter, kecepatan 15 knot, dan tenaga mesin bantu sebanyak 2 unit.(*)

Terminal merupakan salah satu bagian dari sistem transportasi dimana terminal sebagai salah satu simpul transportasi. Terminal memegang peranan penting yang dapat membantu memperlancar kegiatan transportasi.

Mengingat fungsi dan peranan Terminal yang sangat strategis maka terminal perlu mendapat perhatian berupa peningkatan kualitas baik pelayanannya maupun prasarananya.

Serah Terima Aset Terminal Tipe A Tidar Magelang

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan Serah Terima Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang dengan Pemerintah Kota Magelang pada Jumat (3/7).

Dalam acara yang dihadiri oleh Walikota Magelang, Sigit Widyonindito ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan serah terima Terminal Tipe A Tidar ini kelak akan menghasilkan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat Magelang. Adapun kegiatan serah terima Terminal Tipe A dari Pemkot Magelang kepada Ditjen Hubdat mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Sesuai arahan dari Bapak Menteri Perhubungan bahwa apa yang ada di pusat seperti terminal atau jembatan timbang harus dinikmati sampai ke bawah hingga masyarakat. Harapan kami begitu diserahkan (Terminal Tipe A Tidar) akan langsung kami benahi,” ujar Dirjen Budi.

Dalam sambutannya, Dirjen Budi menjelaskan bahwa dalam tahun 2020 ada 15 terminal yang akan dilakukan modernisasi oleh Ditjen Hubdat. “15 Terminal tersebut akan kami tingkatkan kualitasnya,

PENGALIHAN ASET DAN REVITALISASI TERMINAL TIPE A

Sebanyak 15 Terminal akan direvitalisasi, ditingkatkan kualitasnya, baik insfrastruktur, sumber daya manusia, maupun konsep terminal diarahkan menuju mixed use. Terminal Bus Tipe A tak hanya semata simpul transportasi saja namun ada kegiatan bisnis, sosial, budaya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.



Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menerima dokumen aset Terminal Tidar dari Walikota Magelang, Sigit Widyonindito, di Pendopo Balai Kota Magelang, 3/7/2020. Serah terima Terminal Tipe A dari Pemkot Magelang kepada Ditjen Perhubungan Darat mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Foto: HMS DJPD/ABA.

baik menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM), prasarana, dan konsep terminal yang mixed use. Artinya di dalam terminal tak hanya semata terminal saja namun ada kegiatan bisnis, sosial, dan bahkan kegiatan pendidikannya,” lanjutnya.

Adapun ke 15 Terminal Tipe A di Indonesia yang akan dilakukan peningkatan atau revitalisasinya selama 2020 yakni:

1. Terminal Tipe A Amplas, Medan
2. Terminal Tipe A

3. Terminal Tipe A Harjamukti, Cirebon
4. Terminal Tipe A Guntur Melati, Garut
5. Terminal Tipe A Pekalongan
6. Terminal Tipe A Mangkang, Semarang
7. Terminal Tipe A Demak
8. Terminal Tipe A Purwokerto, Banyumas
9. Terminal Tipe A Tirtonadi, Surakarta
10. Terminal Tipe A Tamanan, Kediri
11. Terminal Tipe A Mengwi
12. Terminal Tipe A Bolaang

- Mongondow
- 13. Terminal Tipe A Induk Lumpue, Pare-Pare
- 14. Terminal Tipe A Puwatu, Kendari
- 15. Terminal Tipe A Samarinda Seberang, Samarinda

Ke depannya dengan proses pengalihan Terminal Tipe A Tidar ini dapat dimanfaatkan untuk Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. “Tahun ini akan saya lakukan kajian dan mulai disiapkan tahun depan untuk pembangunannya. Saya juga akan berdiskusi dengan Badan Otorita Borobudur untuk dapat kerja sama terkait pembangunan (fasilitas keselamatan dan transportasi) di Borobudur,” jelas Dirjen Budi.

Sementara itu Walikota Magelang, Sigit Widyonindito menanggapi positif atas rencana pembangunan yang disampaikan oleh Dirjen Budi. “Maknanya (pembangunan) ini adalah pertumbuhan untuk rakyat bukan untuk yang lainnya. Jadi pertumbuhannya nanti bagus, kesejahteraannya dinikmati oleh rakyat. Nanti UMKM boleh masuk, kemudian ada hotel, dan lainnya. Kalau produk UMKMya bisa masuk nanti ekonomi rakyat terus berputar. Terminal pun mindset nya tidak seperti dulu. Saya senang kalau ada terminal yang bagus,” kata Sigit.

Serah Terima Aset Terminal Tipe A Tangkoko Bitung

Untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi Terminal Tipe A pada lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada Jumat (4/9) telah melakukan Serah Terima Terminal Tipe A Tangkoko dari Pemerintah Kota Bitung kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Imran Rasyid dalam sambutannya



Sesditjen Perhubungan Darat, Imran Rasyid, didampingi Kepala BPTD Sulawesi Utara dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian antara Pemerintah Kota Bitung dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait Serah Terima Aset Terminal Bus Tipe A Tangkoko, Bitung, Sulawesi Utara, 4/9/2020. Foto: HMS DJPD

mengatakan bahwa kegiatan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melakukan tindak lanjut progres penyelesaian pengalihan Terminal Tipe A yang semula dikelola oleh Pemerintah Daerah menjadi dibawah kewenangan Kementerian Perhubungan.

“Pada dasarnya Proses Pengalihan Terminal Tipe A belum sepenuhnya selesai karena beberapa permasalahan di sejumlah daerah yang tidak dapat dipungkiri menjadi kendala tersendiri dalam progres Penyelesaian Pengalihan Terminal Tipe A ini,” kata Imran.

Dalam hal ini Imran menginformasikan dari total keseluruhan Terminal Tipe A yang dialihkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdapat sebanyak 145 Terminal. Dari total tersebut sejumlah 110 Terminal Tipe A yang sudah Serah Terima Operasional dan 35 Terminal Tipe A yang belum Serah Terima Operasional.

Lanjutnya, Imran mengatakan dari jumlah 110 Terminal Tipe A yang sudah Serah Terima Operasional ini terdapat 89 terminal yang

sudah register, 13 terminal proses peralihan aset ke Kementerian Keuangan, dan 8 terminal lainnya masih dalam proses verifikasi aset.

“Sedangkan dari jumlah 35 Terminal Tipe A yang belum Serah Terima Operasional terdiri dari 7 terminal inventarisasi awal, 9 terminal yang masuk kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, dan 19 terminal tidak diserahkan oleh Pemerintah Daerah. Maka itu perlu dilakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut terhadap Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Daerah kepada Kementerian Perhubungan berupa Terminal Tipe A yang masih perlu dilakukan penyelesaian yang berkesinambungan,” ucap Imran.

Pada akhir sambutannya, Imran mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bitung atas terselenggaranya proses peralihan Terminal Tipe A Tangkoko ini yang diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap lokasi KSPN yang nantinya akan berkontribusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dimasa yang akan datang.(*)



Terminal Bus Gambut Barakat, Kalimantan Selatan
Foto: HMS DJPD

AKAN ADA KAMPUS DI TERMINAL BUS GAMBUT BARAKAT

Sebagian tanah dan bangunan Terminal Gambut Barakat, Kalimantan Selatan, akan dikerjasamakan dengan Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari untuk kegiatan belajar mengajar dan kegiatan penunjang akademis lainnya.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengadakan Penandatanganan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara (BMN) pada Terminal Gambut Barakat, Kalimantan Selatan pada Kamis (16/7). Perjanjian BMN ini salah satunya dilakukan dengan Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari.

“Melalui perjanjian sewa dengan Uniska ini nantinya sebagian tanah dan bangunan terminal untuk kegiatan pendidikan/ Lembaga Pendidikan Tinggi, dengan jenis kegiatan berupa kegiatan Non Bisnis, dan kategori bentuk kelembagaan berupa Lembaga

Pendidikan Formal. Ini sangat menarik karena baru pertama kali kita lakukan kerjasama perjanjian sewa terminal dengan kampus, jadi nantinya akan ada kegiatan perkuliahan di Terminal Gambut Barakat,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi yang bergabung dalam acara ini melalui sambungan virtual.

Pada hari ini dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Sewa BMN Terminal Gambut Barakat antara BPTD Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan dengan 3 pihak yakni:

1. Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari yang akan

- bekerjasama memanfaatkan sebagian tanah dan bangunan Terminal Gambut Barakat untuk kegiatan belajar mengajar dan kegiatan penunjang akademis lainnya;
2. Perum DAMRI Cabang Banjarmasin yang akan bekerjasama memanfaatkan sebagian bangunan Terminal Gambut Barakat untuk kantor pemasaran dan penjualan tiket bus angkutan antar kota dan bus pariwisata;
3. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Garuda Biru Barakat yang akan bekerjasama memanfaatkan sebagian bangunan Terminal Gambut Barakat untuk kantor, kantin/cafè dan toko alat tulis kantor.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan, Iman Sukandar hadir sebagai perwakilan dari Ditjen Hubdat sekaligus yang menandatangani perjanjian sewa dengan ketiga pihak. Perjanjian sewa ini dengan ketiga pihak ini akan berlaku selama jangka waktu 3 tahun.

“Terminal Gambut Barakat yang dibangun sejak tahun 2007 dan selesai pada tahun 2012 dengan total anggaran sebesar Rp. 46,41 M yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Selatan



Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan, Iman Sukandar hadir sebagai perwakilan dari Ditjen Hubdat sekaligus yang menandatangani perjanjian sewa dengan pihak penyewa, di Terminal Bus Tipe A Gambut Barakat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 16/7/2020. Foto: BPTD XV Kalsel

dan APBD Kabupaten Banjar. Terminal Gambut Barakat dengan luas lahan 41.893 m2 dan dengan luas bangunan 1.168,2 m2 hingga saat ini belum bermanfaat secara optimal. Salah satu upaya untuk mengoptimalkannya maka hadir kebijakan konsep mixed use terminal,” jelas Iman.

Konsep mixed use yaitu penggunaan bangunan/ kawasan terminal untuk lebih dari satu kegunaan, dengan menggabungkan fungsi sebagai kantor, tempat tinggal, penginapan/hotel, pusat perbelanjaan, dan pusat aktivitas lainnya di area yang berdekatan atau bahkan di gedung yang sama dengan terminal tersebut.

Melalui laporannya dalam acara tersebut, Iman menjelaskan bahwa BPTD Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan telah berupaya mengimplementasikan dan mengembangkan konsep mixed use terminal. “Kami mencoba menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang potensial, tertarik, dan bersedia untuk bekerjasama memanfaatkan

tanah dan bangunan Terminal Gambut Barakat,” tambah Iman.

Terminal penumpang tipe A yang diserahkan dalam kondisi yang bervariasi. Beberapa diantara terminal tersebut dalam kondisi manfaat aset dan fungsinya tidak optimal sehingga menjadi salah satu isu strategis di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Terminal Penumpang Tipe A Gambut Barakat di Provinsi Kalimantan Selatan termasuk salah satu terminal yang menjadi bagian dari isu strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

“Kami dari Ditjen Hubdat menyambut baik upaya untuk pemanfaatan terminal ini. Kami memperhatikan berbagai cara agar dapat meningkatkan dan mengoptimalkan manfaat Terminal Gambut Barakat. Secara umum kami terbuka bagi pihak-pihak lainnya yang ingin menjadi mitra kerjasama untuk pemanfaatan lahan dan bangunan Terminal Tipe A. Kami pun berharap ke depannya semakin banyak kerjasama yang terjadi di terminal lainnya dengan beragam pemanfaatan terminal,” pungkas Dirjen Budi.(*)



Pengguna jalan mengendarai otopet atau skuter listrik di Jakarta, Rabu (16/10/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan menyiapkan regulasi untuk penggunaan skuter listrik di jalur sepeda. Foto: merdeka.com/Iqbal Nugroho

husus. Memang kendaraan ini dapat beroperasi di trotoar, namun harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain yaitu pejalan kaki,” kata Jabonor, Kasi Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

Kendaraan tertentu berpengerak motor listrik juga dapat beroperasi di kawasan tertentu yaitu pemukiman, lokasi car free day, kawasan wisata, area sekitar sarana angkutan umum sebagai integrasi moda, area kawasan perkantoran, dan area di luar jalan. “Selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dapat menetapkan lajur khusus atau lajur sepeda untuk kendaraan tertentu ini,” tambahnya.

“Selain itu, yang perlu diperhatikan,” lanjut Jabonor, “Pengendara harus mengenakan helm, dan berusia minimal 12 tahun.” Kendaraan tertentu seperti otopet, yang tidak dilengkapi tempat duduk, dilarang digunakan untuk berboncengan. Kemudian, memodifikasi daya motor untuk meningkatkan kecepatan, juga dilarang. Otopet, hoverboard, dan unicycle, dapat beroperasi dengan kecepatan maksimal 6 km/jam. Sedangkan skuter listrik dan sepeda listrik dapat beroperasi dengan kecepatan maksimal 25 km/jam.

Terkait uji tipe kendaraan bermotor listrik, sesuai PM 44 Tahun 2020, terdapat 5 poin penting yang diuji, yaitu: unjuk kerja akumulator listrik; alat pengisian ulang energi listrik; pengujian kemampuan perlindungan terhadap sentuh/kontak listrik; keselamatan fungsional; dan emisi hidrogen.

Ada 5 jenis kendaraan tertentu dengan pengerak motor listrik diantaranya skuter listrik, sepeda listrik, hoverboard, sepeda roda satu/ unicycle, dan otopet.

MENUJU ERA KENDARAAN LISTRIK

Untuk menertibkan penggunaan kendaraan listrik pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Pengerak Motor Listrik.

juga digunakan pada kendaraan tertentu seperti skuter listrik, sepeda listrik, hoverboard, sepeda roda satu (unicycle), dan otopet.” Saat ini kendaraan tertentu sedang diminati oleh masyarakat karena ramah lingkungan, ringan, praktis, dan hemat. Untuk menertibkan penggunaan kendaraan tertentu tersebut dimaksud pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Pengerak Motor Listrik. “PM

tersebut mengatur persyaratan teknis kendaraan, jalur yang boleh dilewati, dan persyaratan pengguna,” tambah Endy.

Yang dimaksud kendaraan tertentu berpengerak motor listrik dalam PM 45 Tahun 2020 adalah skuter listrik, sepeda listrik, hoverboard, unicycle, dan otopet. Kendaraan tertentu yang saat ini populer digunakan adalah sepeda listrik dan otopet. “Area operasi kendaraan tertentu berpengerak motor listrik adalah lajur sepeda atau lajur yang disediakan



Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, dan sejumlah pejabat terkait usai melakukan sosialisasi penggunaan kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik di halaman Kantor Kemenhub, Jakarta, 13/8/2020. Foto: HMS DJPD



“Sebetulnya kehadiran jenis kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik ini untuk membantu mobilitas masyarakat dari shelter mau ke kantor, atau dari rumah ke shelter dan kendaraan ini bisa dimiliki pribadi. Secara sah kami sampaikan bahwa jenis kendaraan ini sudah dilindungi dengan Peraturan Menteri Perhubungan,” kata Dirjen Budi.

Secara umum, kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik ini digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan lajur tertentu. Dalam penggunaannya pun ada beberapa syarat keselamatan yang harus dipenuhi kendaraannya maupun para penggunanya.

“Skuter listrik secara sarana, harus memenuhi unsur keselamatan dengan adanya klakson/bel, sistem rem yang berfungsi dengan baik, ada lampu utama, alat pemantul cahaya di kiri kanan, serta lampu

posisi atau alat pemantul cahaya pada bagian belakang. Untuk sepeda listrik ini prinsipnya harus ada pedalnya, kalau tidak ada maka masuk kategori sepeda motor. Syaratnya sama seperti skuter listrik. Untuk hoverboard, harus ada sistem rem yang berfungsi, ada lampu utama dan alat pemantul cahaya, kecepatan maksimalnya 6km/jam. Berikutnya ada unicycle yang syaratnya sama seperti hoverboard. Untuk otopet harus ada lampu utama, sistem rem yang berfungsi, bel yang bunyinya tidak mengganggu, ada alat pemantul cahaya, serta kecepatan maksimal 6 km/jam,” jelas Dirjen Budi.

Bagi para pengguna harus mengenakan helm saat berkendara, usia minimal 12 tahun, kemudian tidak boleh mengangkut orang kecuali kendaraan dilengkapi tempat duduk. Syarat lainnya yang berlaku saat penggunaan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor

listrik, antara lain:

1. Tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;
2. Memprioritaskan pejalan kaki;
3. Jaga jarak aman dengan pengguna jalan lain;
4. Penuh konsentrasi.

“Harus ada pendampingan dari orang dewasa jika usia pengguna antara 12-15 tahun. Area operasi kendaraan yakni di lajur khusus di lajur sepeda dan lajur yang disediakan khusus serta Kawasan tertentu seperti pemukiman, car free day, kawasan wisata, area sekitar sarana angkutan umum sebagai integrasi, area perkantoran, atau luar jalan. Bagi area operasi kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik jika tidak tersedia lajur khusus dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki,” tutup Dirjen Budi dalam keterangannya.(*)



PENTINGNYA PERISAI BELAKANG TRUK TRAILER

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merekomendasikan pemasangan alat tambahan pada bumper belakang truk trailer dan tronton untuk mencegah mobil kecil tergelincir ke kolong mobil besar. Alat ini disebut Rear Underrun Protection (RUP) atau Perisai Kolong Belakang.

Berdasarkan data dari Insurance Institute for Highway Safety, jumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan akibat tabrak belakang sangat tinggi dengan jumlah kematian pada kendaraan kecil sebesar 97%. Kejadian tabrak belakang di tol Cipali sekitar 37 kecelakaan setiap bulan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merekomendasikan pemasangan alat tambahan pada bumper belakang truk trailer dan tronton untuk mencegah mobil kecil tergelincir ke kolong mobil besar. Alat ini disebut Rear Underrun Protection (RUP) atau Perisai Kolong Belakang. “Sebagai langkah tindak lanjut rekomendasi dari KNKT untuk meningkatkan

aspek keselamatan bidang LLAJ, serta untuk menurunkan angka fatalitas akibat mobil kecil tabrak belakang mobil besar perlu dilakukan pemasangan RUP pada kendaraan bak muatan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam kegiatan Pemasangan RUP pada chassis truk trailer dan tronton di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Banyumas (18/7).

Dirjen Budi melanjutkan, “Dengan penambahan alat RUP ini diharapkan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan pada saat tabrakan belakang dengan kendaraan kecil, sehingga kecelakaan tidak fatal.” Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor AJ. 510/1/14/DRJD/2020 perihal himbauan pemasangan bumper belakang pada kendaraan bermotor jenis mobil barang bak muatan. Di Eropa, hal ini telah diatur dalam UN Regulation 58.”Jadi ketika ada kejadian mobil kecil tergelincir atau menabrak bagian belakang truk besar, dia akan terahan oleh alat ini (RUP), kemudian airbag akan mengembang, dan penumpang mobil kecil bisa selamat,” jelas Dirjen Budi.

Selain perisai kolong belakang, lanjutnya, ada juga stiker pemantul cahaya yang berfungsi membantu pengguna kendaraan di belakangnya terutama pada malam hari. Namun dirinya mengungkapkan di pasaran banyak beredar stiker pemantul cahaya yang kualitasnya tidak sesuai standar.

Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono, yang juga hadir pada kegiatan tersebut, mengatakan bahwa kecelakaan di Tol Cipali sudah terlalu banyak, sehingga dengan pemasangan perisai kolong belakang diharapkan dapat mengurangi fatalitas akibat tabrak belakang. “Di Tol Cipali, dalam sebulan rata-rata ada 36 kejadian yang tabrak belakang. Dan fatalitasnya, Jalan Tol Cipali itu enggak ada salahnya, cuma salahnya posisinya. Kalau orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Cipali sudah mengantuk, dari Jakarta macet sampai situ mengantuk,” kata Soerjanto.

Dirjen Budi juga mengungkapkan terimakasih atas dukungan pihak-pihak pada kegiatan tersebut. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Aptrindo (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia) Kabupaten Banyumas yang mempunyai inisiatif, gagasan untuk mulai mengkampanyekan dan meningkatkan kembali penggunaan ‘rear underrun protection’ yang sudah lama juga oleh Ditjen Perhubungan Darat didorong kepada pengusaha untuk memasang ini,” pungkasnya.(*)

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menemukan adanya Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) yang teridentifikasi palsu di UPPKB Singosari Malang, Jawa Timur. Temuan ini awalnya diketahui oleh Kepala Satpel Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Singosari, Bambang Kartika.

Berdasarkan keterangan resminya menanggapi pemalsuan BLU-e ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi pada saat Konferensi Pers di Hotel Ijen Suites Malang, Kamis (27/8) menjelaskan bahwa pihaknya segera membentuk anggota tim identifikasi temuan BLU-e yang berasal dari gabungan personil dari Ditjen Hubdat dan Inspektorat Investigasi-Inspektorat Jenderal.

“Tim identifikasi bertugas untuk melakukan identifikasi temuan BLU-e yang teridentifikasi palsu. Dari hasil pengawasan kendaraan barang di UPPKB Singosari pada 9 Juli dan 28 Juli 2020 ditemui dugaan bentuk fisik dimensi kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk tipe dump truck dan truk fuso,” ujar Dirjen Budi.

Dari hasil temuan ini terdapat 5 dokumen palsu yakni 3 diantaranya dokumen BLU-e yang disita oleh Kepala Satpel UPPKB Singosari yakni dengan nomor polisi B 9891 TYW (DKI Jakarta), BE 8869 PL (Lampung Tengah), dan K 1861 PN (Blora) sedangkan 2 dokumen lainnya yang masih dalam tahap pengembangan.

Dirjen Budi juga mengatakan, “Pemberlakuan BLU-e ini baru saja dilakukan secara serentak di beberapa Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota namun belum merata di seluruh Dishub dikarenakan untuk mengeluarkan BLUE ini harus memiliki alatnya. Jadi artinya buku KIR yang lama



Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menunjukkan BLU-E palsu yang ditemukan di UPPKB Singosari, Malang, 27/8/2020. Foto: HMS DJPD/ABA

WASPADA PEMALSUAN BLU-e BUKTI LULUS UJI ELEKTRONIK

Keberadaan dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor komersial di Indonesia, diikuti data teknis dan data kepemilikannya adalah kumpulan data yang besar volumenya, pesat pertumbuhannya, dan beraneka ragam formatnya. Boleh dikata, kumpulan data tersebut adalah *big data*.

masih berlaku tetapi ke depannya akan diubah dengan BLU-e ini.”

Lanjutnya lagi, Dirjen Budi mengatakan meski baru saja diberlakukan dan sudah ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nya tetapi sudah ditemukan pemalsuan seperti yang terjadi di UPPKB Singosari ini yang dimulai dari pemeriksaan kendaraan truk dengan indikasinya pemalsuan dokumen.

“Pemalsuan ini dilakukan oleh oknum Biro Jasa yang beroperasi di Kabupaten Malang. Oknum tersebut berdomisili di Kecamatan Pagai Kabupaten Malang. Dugaan kuat dokumen palsu

BLU-e banyak dimiliki kendaraan bermotor angkutan barang yang beroperasi di daerah Malang Raya, Jawa Timur dengan nomor polisi kendaraan berasal dari luar daerah Malang Raya,” tambah Dirjen Budi.

Dari hasil penemuan BLU-e palsu ini, Dirjen Budi akan segera mengevaluasi kejadian ini. Menurutnya untuk saat ini petugas UPPKB belum memiliki sarana dan pengetahuan yang cukup terkait ciri-ciri fisik dokumen BLU-e yang asli. Selain itu beberapa penyebab hal ini antara lain akibat minimnya sarana dan prasarana untuk identifikasi keaslian dokumen

BLU-e di UPPKB, belum serentaknya pelaksanaan pengujian kendaraan dengan BLU-e, juga belum seluruh PPNS memahami prosedur dan hukum acara atas pelaksanaan pemberian sanksi atas pelanggaran angkutan jalan.

Dalam kesempatan ini, Dirjen Budi juga mengapresiasi kerja keras atas koordinasi yang terjalin antara pihaknya di UPPKB Singosari dengan Polres Malang. Per tanggal 14 Agustus barang bukti dibawa ke Polres Malang dan langsung dilakukan pengusutan. Hingga satu hari kemudian, pihak kepolisian berhasil menangkap salah seorang tersangka pemalsuan berinisial K dan tersangka AG yang baru tertangkap hari ini, Kamis (27/8) subuh.

“Ada laptop dan alat cetak yang kami sita dari tersangka. Tidak menutup kemungkinan ada pengembangan perkara, informasi yang kami dapatkan mereka juga satu jaringan dengan pemalsu buku kir program yang lama. Sementara kami input ada 5 orang yang kami amankan dari UPPKB Singosari, ada 5 dokumen dan sedang kami telisik darimana saja mereka mendapatkan barang itu,” ujar Kasatreskrim Polres Malang AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo melalui keterangannya.

Dalam kartu BLU-e ini, Dirjen Budi menjelaskan ada data kendaraan sesudah dilakukan uji berkala setiap 6 bulan sekali, dalam kartu ini ada chip yang memuat data kendaraan. “Masyarakat saat ini belum memahami ciri umum fisik dokumen dan manfaat BLU-e. Selain itu saya menyadari bahkan terbuka potensi pemalsuan dokumen BLU-e yang dapat saja terjadi di wilayah UPPKB lainnya, oleh karena itu kami akan memperkuat pengawasan untuk ke depannya,” ucap Budi.

Untuk memutus mata rantai pemalsuan BLU-e ini, menurut



Kartu pintar (smartcard) BLU-e (Bukti Lulus Uji Elektronik). Dalam kartu BLU-e ada chip yang memuat identitas kendaraan termasuk foto kendaraan.

Dirjen Budi dapat dilakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah, petugas UPPKB, pemilik barang, dan pihak terkait lainnya terkait Pengujian Kendaraan Bermotor. Selain itu dapat disusun tata cara dan prosedur kewenangan penindakan PPNS dalam pengawasan angkutan jalan serta melakukan pelatihan bagi PPNS agar memahami prosedur sesuai hukum yang berlaku.

“Ke depannya dapat dilakukan operasi penertiban atas kepemilikan dan kelengkapan dokumen BLU-e. Juga akan dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan secara derivatif dari ketentuan pasal 182 PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan,” ujarnya.

Dirjen Budi menambahkan, “BLU-e ini baru diluncurkan pada tahun lalu yang menggunakan kartu. Jadi ada 3 komponen yaitu kartu, stiker yang dipasang di kaca, dan lembaran yang menyangkut identitas kendaraan yang dipegang pengemudi beserta kartunya. Kemudian ada perubahan sangat sis-

tematis dari bentuk buku menjadi kartu. Dulu saat masih berbentuk buku ada kelemahan menyangkut distribusi dimana dari Pemda langsung meminta buku ini kepada pencetaknya tanpa ada biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Untuk sekarang ini dari masing-masing Dishub akan meminta kartu ini kepada Kementerian Perhubungan untuk uji berkala dan ini ada PNBP nya sekitar Rp25.000 dan akan disetor langsung ke negara. Dari Pemda nanti ada aturan sendiri tarifnya berbeda tapi rata-rata tidak lebih dari Rp100.000.”

Dirjen Budi menjelaskan bahwa dalam kartu BLU-e ada chip yang memuat identitas kendaraan termasuk foto kendaraan. Berdasarkan hasil temuan di UPPKB Singosari, BLU-e tersebut secara fisik bentuk kartunya mirip dengan yang asli namun saat dilakukan scanning data-datanya tidak muncul. “Sepintas jika dengan mata telanjang memang susah dibedakan. Beberapa UPPKB sudah dilengkapi dengan reader untuk membaca BLUE. Saat ini sudah ada 2 orang tersangka dalam penyelidikan di Polres Malang dan ada 5 kendaraan truk yang indikasi BLUE nya palsu,” pungkas Dirjen Budi. (*)



Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi sedang melakukan pemotongan kendaraan yang over dimensi dengan menggunakan alat las/blinder, di Palembang, 12/9/2020 (HMS DJPD).

NORMALISASI TRUK ODOL DI PALEMBANG

Kementerian Perhubungan telah melakukan Deklarasi terhadap kendaraan ODOL dengan bekerjasama dengan stakeholder baik pemerintah maupun swasta.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi melakukan normalisasi angkutan barang dengan muatan dan dimensi berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) di Terminal Tipe A Alang-Alang Lebar Palembang, Sabtu (12/9).

Sebanyak 2 unit kendaraan yang terdiri dari Dump Truck Tronton konfigurasi sumbu 1.22 dan Truck Fuso Bak terbuka konfigurasi sumbu 1.2 akan dipotong dan disesuaikan dengan ukuran normalnya. “Gerakan (normalisasi truk ODOL) ini kita harap tidak berhenti sampai di sini. Sebelumnya sudah ada di Padang, Pekanbaru, dan Semarang. Berikutnya di Medan akan kita potong lagi truk-truk yang ODOL. Mobil-mobil yang seperti ini memberikan dampak langsung pada kecelakaan lalu lintas di Sumatera Selatan, juga menimbulkan kerusakan jalan. Saya kira sudah saatnya kita bertindak tegas terhadap kendaraan ODOL,” katanya.

Lanjutnya lagi, bahwa kegiatan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Pemerintah saat ini gencar melakukan normalisasi dimensi kendaraan karena melihat ODOL tidak hanya berdampak pada kerugian materil tetapi juga memakan korban jiwa.

“Kalau truk nya tidak sesuai regulasi maka tidak usah diloloskan uji kir nya. Ke depan jangan hanya ditilang saja, tapi harus dilakukan penyidikan juga. Dalam waktu dekat mobil truk di Jawa dan Sumatera tidak akan diperbolehkan menyeberang di Merak-Bakauheni kalau ODOL karena membahayakan kalau di kapal. Kami juga memohon dukungan Kepolisian dan TNI mudah-mudahan ini awalan kita untuk memperbaiki jalan di Sumatera. Operator logistik, pemilik barang, atau pemilik truk mohon sesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Kalau sudah dinormalisasi seperti ini, sudah dapat dilakukan uji kir. Adapun kedua truk yang dinormalisasi, diserahkan secara sukarela oleh pemilik usaha atas dasar kesadaran penuh untuk menaati aturan yang berlaku,” jelas Dirjen Budi.

INFO SARANA

Kedua truk yang dinormalisasi tersebut yakni:
1. Nama pemilik : PT ARTHA JAYA TRANS, BG 8618 IE. Merek Mitsubishi, Type FM 517 H, Tahun Pembuatan 2002, Mobil Barang jenis Truk bak terbuka dengan Pelanggaran ODOL: mengubah Jarak sumbu (Whellbase) sesuai spesifikasinya 4.280 mm diubah menjadi 5.600 mm, selanjutnya Tinggi Bak Muatan sesuai spesikasinya 850 mm diubah menjadi 2.000 mm, dan Lebar Total kendaraan sesuai spesifikasinya 2.500 mm diubah menjadi 2.612 mm.

2. Nama Pemilik : PT ENERGI FIKO MANDIRI, B 9278 SPA, Merek Hino, Type FM8JMKD-MGJ (FM260JD), Tahun Pembuatan : 2008, mobil barang jenis Dump Truck dengan pelanggaran ODOL Tinggi Bak muatan sesuai dengan spesifikasinya 1.000 mm diubah menjadi 1.700 mm.

“Kita harapkan berikutnya kalau pengusaha truk dan operator logistik akan dikenakan sanksi pidana 1 tahun kurungan dan Rp25 juta, oleh karena itu saya minta dinormalisasi sendiri daripada ditindak oleh kepolisian. Inilah mengapa kami sudah menindak tegas dan diharapkan akan dinormalisasi secara mandiri. Melalui kegiatan ini, kami ini menegaskan kembali bahwa Kementerian Perhubungan telah melakukan Deklarasi terhadap kendaraan ODOL dengan bekerjasama dengan stakeholder baik pemerintah maupun swasta. Selain itu dengan adanya normalisasi truk ini ke depannya akan menguntungkan banyak pihak dan lebih mengutamakan keselamatan berkendara maupun pengguna jalan lainnya, juga akan memicu pertumbuhan truk yang lebih dinamis dan mengurangi kemacetan karena tidak ada truk yang over dimensi,” ungkap Dirjen Budi.(*)

INFO SELINTAS

PRASARANA

KEMENHUB KEMBANGKAN TERMINAL TIPE A DI KALIMANTAN DENGAN SKEMA KPBU



Tantangan keterbatasan anggaran pemerintah dalam melakukan pembangunan saat ini dilalui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan dengan melaksanakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Ditjen Hubdat melaksanakan Konsultasi Publik sebagai salah satu tahapan perencanaan proyek dalam

PRASARANA

GELAR PADAT KARYA, DITJEN HUBDAT LIBATKAN MASYARAKAT SEKITAR TERMINAL BOBOTSARI PURBALINGGA



Sebagai upaya membantu meringankan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Program Padat Karya di beberapa lokasi. Hari ini, Sabtu (5/9), program Padat Karya dilaksanakan di Terminal Bus Tipe A Bobotsari, Purbalingga, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut melibatkan 107 orang warga yang berasal dari Kabupaten Purbalingga.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, dalam sambutannya, mengatakan bahwa kegiatan Padat Karya ini sebagai upaya menjalankan instruksi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan masyarakat lokal, dan juga mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan Pera-

KPBU terkait Pengembangan Terminal Tipe A di Kalimantan yang diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur transportasi. Acara ini digelar pada Selasa (11/8) di Harris Vertue Hotel Harmoni.

Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Risal Wasal dalam sambutannya dalam acara tersebut menyampaikan, “Pada tahun ini, proyek KPBU akan diterapkan di beberapa Terminal Tipe A di Kalimantan, antara lain Terminal Sei Ambawang Kab. Kubu Raya, Terminal Singkawang Kota Singkawang, Terminal WA Gara Kota Palangkaraya, Terminal Gambut Barakat Kab. Banjar, Terminal Samarinda Seberang Kota Samarinda, dan Terminal Batu Ampar Kota Balikpapan.”

Ia pun mengakui bahwa hingga saat ini sebagian besar kondisi fasilitas utama dan penunjang serta pengelolaan Terminal Tipe A belum optimal dan masih menggunakan pola lama, sehingga perlu adanya peningkatan fasilitas ser-

ta perubahan pola terminal dari pola lama menjadi Transit Oriented Development (TOD) dengan mixed use.

“Dengan demikian, pengembangan Terminal Tipe A dengan konsep mixed use ini akan mendukung pengembangan daerah di sekitar terminal, mengurangi kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan, berpotensi menambah kunjungan penumpang ke terminal, meningkatkan pendapatan daerah di sekitar lokasi, meningkatkan potensi permintaan hotel, restoran dan wahana wisata, serta memberdayakan potensi produk dan kesenian masyarakat setempat,” jelas Risal.

Konsultasi Publik ini pun dilakukan bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan dan seluruh peserta konsultasi publik dapat guna penyempurnaan studi pendahuluan untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pada tahap penyajian KPBU atau penyajian Outline Business Case (OBC).(*)

turan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat mengikutsertakan pekerja setempat.

“Sejak merebaknya Pandemi Covid-19, dampak terhadap sektor ekonomi sangatlah besar, dimana banyak karyawan atau pun pekerja yang dirumahkan sementara yang menyebabkan berkurangnya daya beli sebagian masyarakat, untuk itu program Padat Karya diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat,” kata Dirjen Budi.

“Program Padat Karya ini merupakan bentuk kepedulian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terhadap masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kegiatan Padat Karya ini berfungsi untuk memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat, sehingga daya beli dan kesejahteraan bisa meningkat,” kata Dirjen Budi. Kegiatan ini juga merupakan upaya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal, sehingga lebih berperan dalam mendidik masyarakat untuk lebih produktif bekerja dalam pembangunan.

Total Luas lahan Terminal Tipe A Bobotsari adalah 18.005 m2, jumlah kendaraan bus perhari sebanyak 148 bus/hari, melayani keberangkatan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dengan 10 trayek dengan tujuan Jakarta (terminal Pulo Gebang, terminal Kampung Rambutan), Tangerang (terminal Poris Plawad), Bogor (Terminal Baranangsiang), Surabaya (terminal Purabaya).

Lebih lanjut Dirjen Budi mengatakan bahwa Terminal Bobotsari akan dibangun dengan konsep mixed use, yaitu terminal yang tidak hanya sebagai prasarana transportasi namun juga sebagai pusat kegiatan perekonomian masyarakat. “Dengan konsep mixed use, sehingga nanti dapat mendukung pariwisata di sekitar Purbalingga. Kemudian melalui skema Kerjasama Pemanfaatan, diharapkan ada investor yang tertarik untuk menanamkan investasi di sini,” kata Dirjen Budi.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Lasmi Indaryani, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengungkapkan apresiasinya atas kegiatan padat karya yang diadakan di Terminal Bobotsari, Purbalingga. “Saya apresiasi dengan program seperti ini dan memang hari ini saya request khusus untuk padat karya kali ini melibatkan ibu-ibu, diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga,” kata Lasmi.(*)

UMUM

SEPAKATI PELATIHAN SDM DI SEKTOR DARAT, DITJEN HUBDAT- BPSDMP TANDA TANGANI MOU



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menjalin kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tentang Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Darat. Kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama ini digelar pada Kamis (9/7) yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Sugihardjo.

Pokok dari Kesepakatan Bersama (MoU) ya g ditandatangani hari ini di Kemenhub, terkait kerjasama pendidikan dan pelatihan kompetensi SDM bidang transportasi darat.

“Saya menyampaikan terima kasih dan

penghargaan kepada BPSDMP dan tim. Saya rasa hari ini adalah awalan yang baik bagi perhubungan darat untuk peningkatan SDM. Dengan hadirnya Direktorat TSDP, secara kuantitas memang sudah tercukupi namun kami merasa kekurangan menyangkut kualitas. Kami menyadari pendidikan formal di lingkungan perhubungan darat tidak banyak tapi ternyata keahlian yang dimiliki harus terus dikembangkan. Dengan dinamika perkembangan lingkungan yang pesat sekali membutuhkan pengembangan pada aspek kelembagaan, kemudian membutuhkan peningkatan kualitas SDM. Kami menyambut baik apa yang dilakukan oleh Ditjen Hubdat dan BPSDMP hari ini,” demikian disampaikan Dirjen Budi dalam acara tersebut.

Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang transportasi darat;
2. Penyusunan dan pengembangan kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang transportasi darat;
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang transportasi darat;
4. Pertukaran data dan informasi terkait sumber daya manusia di bidang transportasi darat;

5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK (Ditjen Hubdat dan BPSDMP).

“Saat ini kami juga sedang melakukan survey dimana para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat kami menjalankan tugas dan fungsinya yang tidak hanya berorientasi kepada anggaran kegiatan saja tapi juga kita lihat bagaimana aspek kepemimpinannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat kami di Perhubungan Darat untuk memicu kami dalam peningkatan kualitas skill SDM kami,” tambah Dirjen Budi.

Sementara itu, Sugihardjo juga menyambut baik adanya kolaborasi antara pihaknya dan Ditjen Hubdat. “Kolaborasi dan sinergi antara BPSDM Perhubungan yang diwujudkan dalam pelaksanaan kesepakatan dalam rangka pendidikan dan pelatihan kompetensi SDM dibidang perhubungan darat diharapkan dapat menjadi titik awal untuk terwujudnya link and match antara pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDM Perhubungan dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh Sumber Daya Manusia Transportasi Perhubungan Darat sehingga memperkecil gap antara demand dan supply dalam rangka penyediaan SDM transportasi yang berkompeten untuk terselenggaranya sarana transportasi yang andal,” jelas Sugihardjo melalui kesempatan yang sama. (*)

BPTD

GENCARKAN KESELAMATAN BERKENDARA, DITJEN HUBDAT GELAR PEKAN NASIONAL KESELAMATAN JALAN DI KENDARI



Meski dihadapkan pada masa pandemi Covid-19, upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keselamatan berkendara dan menekan angka kecelakaan lalu lintas terus dilakukan, mengingat kecelakaan lalu lintas didominasi korban dari usia produktif. Berkenaan dengan hal tersebut pada Minggu (20/9) pagi,

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) 2020 di Hotel Claro Kendari dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Kegiatan ini diisi melalui acara Fun Bike / Gowes dan Webinar “Berkendara Aman dan Selamat di Masa Pandemi Covid-19” sebagai rangkaian memperingati Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada tanggal 17 September 2020 yang lalu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, membatasi jumlah peserta, menjaga jarak dan rangkaian acara yang dapat diselenggarakan secara virtual.

“Tema Pekan Nasional Keselamatan Jalan tahun ini berfokus pada Komitmen Pemimpin untuk menyuarakan Keselamatan Jalan yang di sertai oleh kepedulian dan peran serta masyarakat akan pentingnya Keselamatan di Jalan dengan slogan Sayangi Nyawa Suarakan Keselamatan Jalan,”kata Imran Rasyid, Sekretaris Di-

rektorat Jenderal Perhubungan Darat. Menurut Imran, berdasarkan data dari Polri pada tahun 2019 terdapat jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 116.411 kejadian sehingga mengalami kenaikan sebesar 7% dari tahun sebelumnya.

“Dari jumlah yang saya sebutkan, kejadian kecelakaan berdasarkan jenjang pendidikan korban tertinggi adalah pelajar dan mahasiswa sebanyak 71.134 kejadian sedangkan kejadian dengan rentang usia 10-14 tahun sebanyak 7.129 kejadian dan kejadian dengan rentang usia 20-24 tahun sebanyak 13.170 kejadian,” ucap Imran.

Imran menambahkan, kecelakaan lalu lintas biasanya terjadi diawali dengan pelanggaran dan sampai saat ini tumbuh kembang budaya melanggar dalam berlalu lintas di Indonesia dapat dikatakan sangat pesat. “Tingginya angka pelanggaran lalu lintas mengindikasikan semakin rendahnya norma dan etika berlalu lintas, serta semakin buruknya budaya keselamatan transportasi jalan di Indonesia,” kata Imran. (*)

PRASARANA

DIRJEN HUBDAT LAUNCHING PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT DI SULAWESI TENGGARA



Pembangunan infrastruktur transportasi darat penting dilakukan di seluruh wilayah Indonesia mengingat kehidupan sehari-hari masyarakat erat kaitannya dengan infrastruktur transportasi. Berkenaan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi melakukan

Launching Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat Sulawesi Tenggara diantaranya: (1) Terminal Tipe A Puuwatu; (2) Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa, Tomia, dan Binongko; (3) Pelabuhan Penyeberangan Siompu dan Kadatua, pada hari Sabtu (19/9) di Terminal Tipe A Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dalam sambutannya, Dirjen Budi mengatakan, “Memang terdapat beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab kami Ditjen Perhubungan Darat yaitu pembangunan dermaga, kapal, dan pembangunan Terminal Puuwatu.”

Dirjen Budi menambahkan bahwa pada tahun 2019, ia memiliki visi dan misi agar setiap pembangunan infrastruktur atau sarana transportasi darat tidak hanya tersampaikan atau terbangun saja namun harus memberikan manfaat atau kebanggaan kepada bangsa Indonesia. “Jadi di tahun-tahun berikutnya seperti be-

UPPKB Cikande dan UPPKB Cimanuk serta di BPTD-BPTD lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan yang dilakukan ini sebagai upaya Pemerintah dalam menyelenggarakan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan sehat pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan, “Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini adalah demi menyadarkan masyarakat, seperti yang kita ketahui setiap harinya peningkatan pasien COVID-19 semakin bertambah. Jadi penyebaran COVID-19 ini begitu cepat sekali, banyak beberapa masyarakat yang tidak sadar pentingnya menggunakan masker sehingga mereka mudah terpapar. Kalau bukan kita yang bertindak sekarang, nantinya semua akan terlambat.”

Menurut Dirjen Budi untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini diperlukan peran serta semua pihak untuk saling baur-membaur dan gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. “Dengan adanya kegiatan ini saya berharap sifatnya tidak hanya seremonial saja, tetapi adanya keberlangsungan komitmen dan konsistensi Pemerintah mau-

berapa pembangunan di Danau Toba, membuktikan bahwa pembangunan yang ada memiliki manfaat dan ciri negara yang lebih baik,” ujar Dirjen Budi.

Dirjen Budi berharap dengan nantinya pembangunan beberapa dermaga dan terminal di Sulawesi Tenggara ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mewujudkan kemudahan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau di Sulawesi.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, dalam sambutannya mengatakan, “Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat serta dukungan dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae yang sangat perhatian dengan daerah kita. Tentu kita sangat bangga, saya mewakili masyarakat Sulawesi Tenggara mengapresiasi yang tak terhingga karena pembangunan infrastruktur transportasi darat ini sangat luar biasa.” (*)

pun operator,” tutur Dirjen Budi.

Senada dengan pernyataan Dirjen Budi, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten, Endi Suprasetio mengatakan, “Kami (BPTD) juga telah meminta kepada pengelola dan penyedia jasa transportasi untuk secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan pada sarana maupun prasarana, menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan, menerapkan physical distancing dan membatasi jumlah penumpang.”

Selain itu Endi juga mengatakan akan secara tegas memberikan sanksi kepada operator yang melanggar. “Kita juga sudah mengimbau kepada pengguna jasa transportasi untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah seperti menjalankan gerakan hidup sehat dan menjalankan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak antar penumpang,” jelas Endi.

Adapun dalam acara ini PT Jasa Raharja dan PT Jasaraharja Putera memberikan bantuan sebanyak 1.500 masker dan 1.000 hand sanitizer kepada Ditjen Hubdat sebagai bagian dari Program Bina Lingkungan. Nantinya Ditjen Hubdat akan menyalurkan bantuan ini juga kepada masyarakat khususnya pengguna transportasi. (*)

TSDP

DITJEN HUBDAT SIAPKAN SEJUMLAH REGULASI PENYELENGGARAAN TSDP



Usai terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mulai menyusun regulasi seputar penyelenggaraan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP).

“Sejak fungsi keselamatan dan kesyahbandaran sudah dilimpahkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maka kami rasa hal ini perlu didukung oleh regulasi yang mengatur mengenai Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan,” demikian disampaikan Endy Irawan, Kepala Bagian Hukum dan Humas saat membuka Workshop Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2020 mengenai TSDP di Palembang, Sumatera Selatan pada Selasa (29/9).

Dalam PM 122/2018 diatur bahwa fungsi pengawasan operasional keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga Pemerintah sebagai pembina memiliki kewajiban terhadap terlaksananya pengaturan, pengendalian, dan pengawasan TSDP serta dalam rangka menjamin pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis yang menjamin aspek keselamatan TSDP.

Rancangan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perhubungan Darat yang dibahas, antara lain:

1. Perdirjen Tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan;
2. Perdirjen Tentang Kapal Penyeberangan;
3. Perdirjen Tentang Pedoman Teknis Halte Sungai dan Danau;
4. Perdirjen Tentang Pedoman Teknis Rambu Sungai dan Danau; dan
5. Perdirjen Tentang Tugas dan Fungsi Pengawasan Operasional Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan.*

PRASARANA



GELAR BIMTEK UPPKB, DITJEN HUBDAT KEMBALI GAUNGKAN INDONESIA BEBAS ODOL

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Tahun 2020 di Kuta, Bali pada Rabu (23/9) untuk memberikan pemahaman terkait penimbangan kendaraan bermotor dan mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dalam menyelenggarakan penimbangan kendaraan bermotor sehingga dapat mewujudkan program Indonesia Bebas Over Dimension and Over Loading (ODOL) pada tahun 2023.

“Dalam Bimtek ini, peserta diberikan materi-materi mengenai kebijakan penanganan ODOL dan penyelenggaraan UPPKB, sosialisasi dan uji publik tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan, penindakan P21 terhadap kendaraan ODOL, kebijakan normalisasi kendaraan, penegakan Hukum di UPPKB, kebijakan penyelenggaraan angkutan barang di jalan, serta cara mengubah persepsi masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan UPPKB. Ada pula pelatihan sistem JTO dan pelatihan sistem evaluasi penilaian kinerja UPPKB (SIEVA),” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, dalam sambutannya pada bimtek ini.

Acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai pembina teknis penyelenggaraan UPPKB dengan petugas lapangan UPPKB serta untuk meningkatkan kompetensi petugas UPPKB melalui pelatihan menggunakan aplikasi Jembatan Timbang Online (JTO).

Di sisi lain, untuk meningkatkan kinerja UPPKB sebagai garda terdepan penanganan ODOL, Ditjen Hubdat telah melakukan rehabilitasi bangunan UPPKB, transparansi layanan melalui komitmen

bersama “NO PUNGLI”, peningkatan kapasitas SDM UPPKB, kerja sama operasional UPPKB dengan pihak swasta, pengembangan sistem informasi terintegrasi di UPPKB, serta penerapan sistem manajemen mutu menuju sertifikasi ISO 9001:2015. Adapun teknologi yang telah diterapkan di UPPKB antara lain sensor dimensi, detektor kendaraan, CCTV, dan Weigh in Motion (WIM).

“Seperti yang telah kita ketahui, ODOL harus diberantas karena mampu menimbulkan beragam permasalahan seperti, kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan, tingginya biaya perawatan infrastruktur, mengurangi daya saing internasional karena kendaraan ODOL tidak bisa melewati Pos Lintas Batas Negara (PLBN), memperpendek umur kendaraan, hingga menimbulkan polusi udara yang berlebihan,” lanjut Dirjen Budi.

Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Risal Wasal, yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan, “Ke depannya, saya berharap para Korsatpel mampu meningkatkan pelayanan dan kinerja operasional. Mari kita mengucapkan syukur karena UPPKB Losarang dan BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 dari TUV Rheinland, Jerman yang merupakan lembaga internasional bidang penilaian layanan publik. Saya berharap prestasi ini dapat memotivasi Korsatpel lainnya untuk menerapkan standar ISO 9001:2015 dalam penyelenggaraan UPPKB.”

Target sertifikasi ISO 9001:2015 yang dimaksud akan diterapkan di beberapa UPPKB seperti, Sibolangit, Mambang Muda, Dolok Estate, Tanjung Balik, Sungai Langsat, Balai Raja, Jambi Merlung, Muara Tembesi, Balonggandu, Kulwaru, Rejoso, Cekik, dan Nun Baun Sabu.*



LENSA HUBDAT



Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi memantau penyediaan bantuan bus di Stasiun Bogor (20/7/2020). Demi mengurangi kepadatan penumpang di commuter line, Kementerian Perhubungan menyediakan bus untuk melayani penumpang dari Bogor menuju Jakarta.



Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, memantau arus balik Idul Adha di Terminal Pulo Gebang dan Tol Jakarta Cikampek, 30/7/2020.

► Peletakan batu pertama pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sampalan dan Bias Munjul oleh Menteri Perhubungan di Nusa Penida, Bali, 3/8/2020



◀ Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi; dan Kakorlantas Polri, Istiono, memantau arus balik Libur Tahun Baru Islam di Cikopo, 23/8/2020.

▼ Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menghadiri kegiatan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Waduk Cirata, Cianjur, 30/8/2020.



◀ Peletakan Lunas Kapal Penyeberangan 500 GT Lintas Bombana - Tanjung Phising di Galangan Kapal Dok Bahari Nusantara, Cirebon, 4/9/2020.



◀ Penyelenggaraan Program Padat Karya di Terminal Tipe A Bobotsari, Purbalingga, 5/9/2020.

► Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Risal Wasal, menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Badan Pengatur Jalan Tol dan Asosiasi Jalan Tol Indonesia, Labuan Bajo, 11/9/2020.



► Rapat Koordinasi Angkutan Penyeberangan Perintis, Bali, 24/9/2020.



► Dirjen Perhubungan Darat sebagai narasumber dalam Press Conference dan Webinar Pekan Sepeda Nasional, Jakarta, 25/9/2020

